STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR

(Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018)

SKRIPSI

Oleh:

Neli Nurmala

NIM. 15230004



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR

(Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018)

SKRIPSI

Oleh:

Neli Nurmala

NIM. 15230004

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

STRATEGI SOSIAISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR

(Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lai, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 20 Noyember 2019

Penulis



Neli Nurmala
NIM15230004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Neli Nurmala NIM: 15230004 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
(Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 November 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Hukum Tata Negara (Siyasah)	
Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag.,MH	Irham Basori Hasba, M.H.
NIP. 196509192000031001	NIP.198512132015031005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Neli Nurmala NIM 15230004, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
(Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. **Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,MH.** (.....)
   NIP 1984052020160801132 Ketua
2. **Irham Basori Hasba.,MH** (.....)
   NIP. 198512132015031005 Sekretaris
3. **Musleh Herry,S.H.,M.Hum** (.....)
   NIP 19680711019990310002 Penguji Utama

Malang, 11 Januari 2020
Dekan,

Dr. H.Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

Sesungguhnya allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian.

Sesungguhnya allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul- (Nya) dan ulil –amri di antara kalian.

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul-(Nya) (Sunnahnya)

Jika benar-benar kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang di turunkan sebelum kamu?

Mereka hendak berhakim kepada thaghut,

Padahal mereka telah diperintahkan mengingkari thaghut itu.

Dan, syetan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh jauhnya.

Apabila dikatakan kepada mereka ; 'Marilah kalian (tunduk) kepada hukum yang Allah turunkan dan kepada hukum Rosul' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu"

(Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 58-61)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamudlillahirobbil 'alamin, segala puji bagi allah SWT. Atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang kita nanti Syafa'atnya. Berkat keridhaan Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018)** "sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Dewan Penguji, penulis mengucakpan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penelitian ini serta memberikan masukan, saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Irham Basori Hasba, M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, saran, dan motifasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, nasihat, doa, perhatian, dukungan,baik secara langsung atau tidak langsung.
9. Anis Suhartini ST selaku ketua KPU Kabupaten Malang sebagai informan yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan peneliti ini.
10. Mahardika Narendra selaku Komisioner KPU Kabupaten Malang sebagai informan yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan peneliti ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

11. Seluruh Anggota KPU Kabupaten Malang yang sudah meluangkan waktunya serta memberikan informasi-informasi penting demi kelanjutan skripsi ini.
12. Teman – teman Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2015 telah memberikan bantuan mengerjakan skripsi serta semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.
13. Semua orang-orang yang belum bisa saya sebutkan secara satu persatu baik keluarga, teman, guru dan yang lainnya yang telah membantu dan mensuport.

Semoga allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari dalam skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi Bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Malang, 20 November 2019
Penulis

Neli Nurmala
NIM 15230004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ ع”.

ا	=Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ق	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = âmisalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة فى الله menjadi *fi rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …" Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
ABSTRAK ..... **xviii**
ABSTRACT ..... **xix**
مستخلص البحث ..... **xx**
BAB 1 ..... **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Batasan Masalah 14
D. Tujuan Penelitian 14
E. Manfaat Penelitian 14
F. Definisi Operasional 15
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II **21**
TINJAUAN PUSTAKA **21**
A. Penelitian Terdahulu 21
B. Tinjauan Pustaka 31
1.Pemilu 31
2.Latar Belakang Golput 34
3.Definisi dan Pandangan Golput (golongan putih) 37
4.Partisipasi Politik 38
5.Teori Perundang-Undangan 40
6.Teori Kebijakan Publik 43
BAB III **46**
METODE PENELITIAN **46**
A. Jenis Penelitian 47
B. Pendekatan Penelitian 47
C. Sumber Data 49
D. Lokasi Penelitian 50
E. Jenis dan Sumber Data 51

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Teknik Pengumpulan Data 52
G. Metode Pengolahan Data 54
BAB IV 58
HASIL PENELITIAN 58
A. Deskripsi Objek Penelitian 58
1. Kondisi Geografi Wilayah Kabupaten Malang 58
2. Kondisi Demografi Wilayah Kabupaten Malang 61
3. Pembagian Wilayah Admistratif 64
B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum 65
C. Gambaran Umum Pemilih Kabupaten Malang dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018 70
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 72
1. Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam Menekan Angka Golput Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018 72
2. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Golput 108
BAB V 123
PENUTUP 123
A. KESIMPULAN 123
B. SARAN 126
C. DAFTAR PUSTAKA 127
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 27
Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Kabupaten Malang. 63
Tabel 4.2 Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Malang 64
Tabel 4.3 Nama-Nama Kecamatan Kabupaten Malang 64
Tabel 4.4 Perbandingan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018 71

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Malang 61
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Malang 68
Gambar 4.3 Bagan struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Malang 69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Nurmala Neli, NIM 15230004**. Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Menekan Angka Golput Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018),** Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Irham Bashori Hasba., M.H

Kata Kunci : Strategi, Partisipasi Masyarakat,Golput

Strategi penekanan angka golput dalam Pemilihan Gubernur di antaranya adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu, menentukan kelompok sasaran yang akan di dekati serta menentukan metode atau media informasi yang akan dilakukan, melakukan kerja sama dengan media sosial seperti bekerja sama dengan perusahaan media cetak, informasi, radio dan lain sebagainya untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan untuk melakukan pendidikan kepemiluan yang berkesinambungan, berkoordinasi Dispendukcapil untuk pencocokan data dalam pemutakhiran data, dan lain sebagainya. KPU menggunakan strategi khusus dalam menekan angka golput, yang sebelumnya angka golput terbilang rendah. Golput (golongan putih) dikatakan haram jika mempunyai dugaan bahwa dengan adanya golput, cita-cita tidak dapat terwujud, jika kita yakin atau tidak berprasangka cita-cita itu akan terlaksana, maka golput itu tidak masalah atau tidak di hukumi haram.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Malang. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, pembuktian kemudian analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Mengetahui strategi KPU Kabupaten Malang dalam menekan angka Golput dengan melakukan perbandingan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018 serta memaparkan hasil rekapitulasi perolehan suara kedua pemilhan tersebut. Memaparkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Malang. (2) Tinjauan yuridis tentang golput menurut fiqih siyasah, dan hukum dalam menggunakan hak pilih. pemilihan umum ini menjadi fardhu kifayah. Golput (golongan putih) dikatakan haram jika mempunyai dugaan bahwa dengan adanya golput, cita cita tidak dapat terwujud, dan jika kita yakin atau tidak berprasangka cita cita itu akan terlaksana maka golput itu tidak masalah atau tidak haram.

Peneliti menyarankan untuk melakukan sosialisasi lebih lebih di perluas lagi hingga turun ke tingkat desa sampai dusun. Lokasi TPS seharusnya tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat sehingga memudahkan akses masyarakat untuk memeberikan hak suaranya sesuai dengan hati nuraninya dan lain sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Nurmala Neli, NIM 15230004. **Malang Regency General Election Commission Strategy Pressing Abstentions in East Java Governor Election (Case Study of Governor Elections in 2013 & 2018),** Thesis Department of State Administration Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Irham Bashori Hasba., M.H

Keywords: Strategy, Community Participation, Abstentions

The strategies to emphasize abstentions in the Governor Election include collaborating with various stakeholders who can be invited to participate in conducting information dissemination and delivery of election information, determining the target groups to be approached and determining the method or media of information to be carried out, conducting work together with social media such as working with print, information, radio and other companies to convey information about electoral. Cooperating with government agencies to conduct continuous electoral education, coordinating with Dispendukcapil for matching data in updating data, and so forth. KPU uses a special strategy in suppressing abstentions, which previously were relatively low abstentions. abstentions (white group) is said to be haram if it has any suspicion that with abstentions, ideals cannot be realized, if we believe or do not prejudice that ideals will be implemented, then abstentions are not a problem or are not punished haram.

This study uses a type of empirical juridical research with the legislation research approach and case approach. This research was conducted at the Malang Regency KPU Office. In collecting data, interviews, observations and documentation were carried out. Data management is done by editing, classifying, proving and then analyzing to get conclusions.

The results of this study are (1) Knowing the Malang Regency KPU strategy in suppressing Golput figures by comparing the 2013 and 2018 Governor Elections and describing the results of the recapitulation of the votes in both elections. Describe the policies issued by Malang Regency KPU. (2) Juridical review of abstentions according to fiqh siyasa, and the law in using good and wise suffrage.

Researchers suggest that more outreach is extended further down to the village level to the hamlet. The location of the TPS should not be far from the community's residence so that the community can easily access their voting rights according to their conscience and so forth.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

نيلى نورملا NIM ١٥٢٣٠٠٠٤ .استراتيجية لجنة الانتخابات العامة في مالانغ ريجنسي للضغط على الامتناع عن التصويت في انتخابات حاكم شرق جاوا (دراسة حالة عن انتخابات المحافظين في عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٨) ، أطروحة قسم قانون إدارة الدولة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج .

المشرف: ارهم باشوري حاصبة

الكلمات المفتاحية: الإستراتيجية ، المشاركة المجتمعية ، الامتناع عن التصويت

شمل استراتيجيات التأكيد على الامتناع عن التصويت في انتخابات الحاكم الحاكم التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الذين يمكن دعوتهم للمشاركة في إجراء نشر المعلومات وتسليم معلومات الانتخابات ، وتحديد الفئات المستهدفة التي سيتم التعامل معها وتحديد طريقة أو وسائط المعلومات التي يتعين تنفيذها ، وإجراء العمل جنبا إلى جنب مع وسائل الإعلام الاجتماعية مثل العمل مع الطباعة والمعلومات والإذاعة وغيرها من الشركات لنقل المعلومات حول الانتخابات. التعاون مع الجهات الحكومية لإجراء تعليم انتخابي مستمر ، والتنسيق مع Dispendukcapil لمطابقة البيانات في تحديث البيانات ، وما إلى ذلك. يستخدم KPU استراتيجية خاصة في قمع الامتناع عن التصويت ، والتي كانت في السابق من الامتناع عن التصويت منخفضة نسبيا. يقال إن الامتناع عن ممارسة الجنس (المجموعة البيضاء) حرام إذا كان لديه أي شك في أنه مع الامتناع عن التصويت ، لا يمكن أن تتحقق المثُل ، إذا كنا نؤمن أو لا نخل بأن المثل العليا ستنفذ ، فإن الامتناع عن التصويت لا يمثل مشكلة أو لا يتم معاقبته.

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث القانوني التجريبي مع منهج بحث قانوني ونهج حالة. تم إجراء هذا البحث في مكتب Malang Regency KPU. في جمع البيانات ، أجريت المقابلات والملاحظات والوثائق. تتم إدارة البيانات عن طريق

التحرير والتصنيف والإثبات ثم التحليل للحصول على الاستنتاجات.نتائج هذه الدراسة هي (١) معرفة إستراتيجية Malang Regency KPU في قمع أرقام Golput من خلال مقارنة انتخابات حكام ٢٠١٣ و ٢٠١٨ ووصف نتائج إعادة تلخيص الأصوات في كلتا الانتخابات. وصف السياسات الصادرة عن Malang Regency KPU. (2)المراجعة القانونية للامتناع عن التصويت وفق الفقه سياسا ، والقانون في استخدام حق الاقتراع الجيد والحكيم.

يشير الباحثون إلى أن المزيد من التوعية يمتد إلى مستوى القرية ليشمل القرية. يجب ألا يكون موقع TPS بعيدًا عن مكان إقامة المجتمع حتى يتمكن المجتمع من الوصول بسهولة إلى حقوق التصويت وفقًا لضميرهم وما إلى ذلك..

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi di artikan sebagai pemerintahan dari rakyat yang berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, dan rakyat itu memiliki kewenangan atau hak dalam menentukan pemerintahan. Berkaitan dengan HAM (hak Asasi Manusia) yang berada di bidang politik. Bentuk pelanggaran terkait politik adalah kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap hak pilih dalam pemilu yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga negara. Memilih secara konstitusional adalah hak dalam praktek melakukan kewajiban, yang kewajiban tersebut harus disalurkan kepada organisasi politik tertentu. Kondisi ini dapat di tandai dengan munculnya beberapa slogan, iklan, fatwa para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakat ini dipolitisasi karena mereka dipaksa untuk mengeluarkan fatwa bahwa memilih atau menjadi golongan putih (golput) itu hukumnya haram. Dampak terjadinya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peristiwa yang terbalik dari yang seharusnya, yaitu angka pemberi suara dalam pemilu yang besar merupakan akibat mobilisasi massa bukan partisipasi. Pemilu seharusnya yang terjadi adalah pasrtisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi, bukan mobilisasi massa dalam pesta demokrasi. [1]

Pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Instrument yang di perlukan bagi partisipasi ialah sistem pemilu. Pemilu merupakan instrument dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, tentu saja dalam teknis pelaksanaannya membutuhkan aturan-aturan yang spesifik, meski demikian pemilu saja bukanlah merupakan suatu jaminan dari demokrasi itu sendiri, akan tetapi pemilu merupakan cara dari di dapatkannya legitimasi atas kekuasaan bagi rezim dalam memerintah. Menurut Dieter Nohlen pemilu adalah satu satunya metode demokratik untuk memilih wakil rakyat.[2] Pengertian Pemilihan Umum menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah :

> *"Sarana, kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*[3]

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi yang berlandaskan hukum. hal ini di atur pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara

[1]Musliichah, *Bunga Rampai Kearsipan*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2016), 103.
[2]Yoyoh Rohaniah, Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang : Intrans Publishing, 2015), 438.
[3]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum.[4] Pemilu yang berada di Indonesia ini adalah bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum yang berlaku.Pelaksanaan pemilu yang partisipatif dan berkualitas, diatur dalam Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

> *"pemilihan umum di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."* [5]

Maksudnya, setiap warga negara memiliki kebebasan dan hak untuk memilih, berarti hak memilih yang di miliki oleh seluruh warga negara dari manapun asal, tempat tinggal, golongan, suku, etnis dan lain sebagainya mimiliki hak yang sama untuk memilih. Hak ini sebaiknya di gunakan dengan baik dan bijaksana. Suatu susunan hierarki peraturan perundang-undangan tentunya ada Undang-Undang yang membahas tentang pemilu khususnya mengatur Pemilihan Umum yang sesuai dengan Pasal 22 Ayat (3) dan Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi yang berbunyi:

> *"(3) Pemilihan umum di selenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".(6)ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum di atur dengan Undang Undang".* [6]

Di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang harus berpedoman pada asas :

a) Mandiri
b) Jujur

---

[4]Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) dan (3).
[5] Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E Ayat (1).
[6] Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 Ayat (3) dan Ayat (6).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Adil
d) Kepastian hukum
e) Tertib
f) Kepentingan umum
g) Keterbukaan
h) Proporsionalitas
i) Profersionalitas
j) Akuntabilitas
k) Efisiensi
l) Efektivitas. [7]

Kemajuan demokrasi Indonesia mulai di tandai dengan adanya kebebasan berpendapat, pembatasan atas kekuasaan, pemilihan umum, pemilihan jabatan-jabatan publik yang kompetitif, pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung, dengan ini partisipasi masyarakat dalam proses berpolitik semakin meningkat. Sama halnya dengan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah juga melaksanakan pemilihan secara demokrasi seperti yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4) yang berbunyi

> *"Ayat (3) pemerintah daerah provisi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ayat (4) gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.* [8]

Sistem pemerintahan yang demokrasi juga harus memenuhi 3 (tiga) syarat pokok yakni : Kompetisi, partisipasi politik, kebebasam sipil dan politik mulai terwjud dalam proses politik ke arah penguatan demokrasi lokal Indonesia. Pilkada langsung adalah proses pencapaian kemajuan perkembangan demokrasi tanah air, selama tahun 2005 merupakan kedaulatan rakyat dan

[7]Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
[8] Lihat Undang –Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelajaran politik baru. Pilkada langsung menjadi solusi sekaligus trobosan dalam mengatasi kemacetan demokrasi lokal. Pilkada secara langsung di harapkan dapat mewujudkan serta membangun *local accountability*. Ketika seorang kandidat yang telah terpilih menjadi kepala daerah (Walikota /Gubernur/Bupati), maka wakil rakyat akan meningkatkan kualitas akuntabilitasnya (pertanggung jawabannya kepada rakyat), sangat mungkin dilakukan karena obligasi moral dan penanaman modal politik menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai wujud pembangunan legitimasi politik.[9]

Komisi Pemilihan Umum bertugas dan mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Di Indonesia ini terdapat banyak pemilihan yang di selenggarakan di antaranya adalah Pemilihan Presiden (Pilpres) Pemilihan Legislatif (pileg) Pemilihan Bupati (Pilbup) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dimana pemilihan ini di selenggarakan setiap 5 tahun sekali. Komisi Pemilihan Umum telah di beri tugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu tersebut agar masyarakat dapat memilih calon pemimpin yang baik sesuai dengan kriteria dan hati nurraninya. Sering kali didapatkannya masalah yang di alami oleh pemerintahan dalam pemilu adalah banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih (Golput) yang di sebabkan kurangnya masyarakat

[9]J Kaloh, SU, *Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung*, (Jakarta, Kata Hasta Pustaka, 2008), 64.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berpartisipasi dan ketidakpercayaan terhadap pejabat yang mencalonkan menjadi pemimpin tersebut.

Golput dijamin secara hukum yang terdapat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisikan tentang apa saja yang sudah menjadi hak asasi manusia, dan terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) yang berbunyi:

> *"(1) setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, (2) setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dana atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kebutuhan. Bangsa."*[10]

Pasal ini di jadikan pedoman pembenaran tentang golput (golongan putih) yang tidak menggunakan hak pilihnya. Golput sendiri harus di dasari dari individu masing-masing tanpa paksaan atau pengaruh dari orang lain, karena dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pasal 442 dan 443 menjelaskan maksud Pasal tersebut bahwasahnya "jika pengguna hak pilih mendapat tekanan maupun dorongan oleh pihak terkait, maka pengawas pemilu wajib melaporkan kejadian tersebut,[11] karena sudah melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 510 dan 515 yang mengatur sanksi pidana dan denda terhadap siapapun secara langsung menekan dan mendorong individu untuk melakukan golput.

[10] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
[11] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keberhasilan dalam pemilu itu di lihat dari masyarakat yang antusias terhadap pemilu dan kesadaran politik, semua itu dilihat dari seberapa besar masyarakat ikut mensukseskan proses pemilu dengan memberikan dukungan, dan dorongan dalam penetapan pemerintahan baik eksekutif ataupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Saling berkaitan dengan tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selaku Badan Penyelenggara Pemilu yang salah satunya kewajibannya terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 14 yang berbunyi:

> *"Melaksanakan tahapan penyelenggara pemilu secara tepat waktu. Dalam pelaksanaanya salah satu tahapan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah melakukan sosialisasi atau menyampaikan semua informasi mengenai kepemiluan agar masyarakat menetahui dan memahami".* [12]

Misalnya apa saja tahapan pemilu dan siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu dan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dengan baik dan benar. Adanya sosialisasi berharap dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan hak suara, karena pemilu adalah proses demokrasi yang menentukan jalannya pemerintahan serta kemajuan bangsa. PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu, meliputi komponen

1. Pemilih berbasis :
   a. Keluarga

[12] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Pemilih Pemula
c. Pemilih Muda
d. Pemilih Perempuan
e. Pemilih Penyandang disabilitas
f. Pemilih berkebutuan khusus
g. Kaum Marjinal
h. Komunitas
i. Keagamaan
j. Relawan demokrasi
k. Warga internet

2. Masyarakat umum
3. Media massaa
4. Partai politik peserta pemilu
5. Pengawas
6. Pemantau pemilu dalam negeri dan pemantau oemilu luar negeri
7. Organisasi kemasyarakatan.
8. Masyarakat adat
9. Instansi pemerintah. [13]

Pengelompokan tersebut dapat memudahkan akses dalam membangun jaringan komunikasi atau sosialisasi serta memberikan materi dan melakukan trobosan-trobosan yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu. Materi yang akan disampaikan pada saat sosialisasi di antaranya terdapat pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 yang berisikan tentang tahapan penyelenggara pemilu mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran, penetapan, pencalonan, kampanye, mekanisme penyelesaian, jenis jenis daftar pemilih, serta peran masyarakat, partai politik, pengawas dan pemantau. Metode yang digunakan dalam penyampaian sosialisasi terdapat dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi,

[13] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal (9) di antaranya :

> "(*a) forum warga, (b) komunikasi tatap muka, c) media massa, d) bahan sosialisasi, e) lat peraga sosialisasi, f) mobilisasi sosialisasi, g) pemanfaatan budaya popular, h) pemanfaatan budaya local/tradisi local, i) laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan / atau KPU/KIP Kabupaten Kota, j) papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan / atau KPU/KIP Kabupaten Kota, k) media social, i) media kreasi dan/atau, m) bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilu dengan baik. "* [14]

Pemiihan Gubernur Tahun 2013 di laksanakan pada tanggal 23 Agustus 2013 periode Tahun 2013-2018 sedangkan Pemilihan Gubernur Tahun 2018 yang di laksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 adalah pemilihan kepala daerah periode Tahun 2019-2024 pemilu ke duanya sama-sama menggunakan sistem demokrasi dengan cara sistem pencoblosan. Pemilu ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan lidah suara masyarakat. akan tetapi, tingkat golput (golongan putih) pada pemilu Tahun 2013 dan Tahun 2018 ini sangat berbeda dan mempunyai perbandingan angka golput (golongan putih) yang signifikan, dengan estimasi prosentase angka golput Pemilihan Gubernur Tahun 2013 adalah 41,8 % dan Pemilihan Gubernur Tahun 2018 adalah sudah mencapai 37%.[15] kedua pemilihan itu jika dilihat sangat signifikan sekali. Kedua pemilu tersebut prosentase tingkat ke golputan mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat ini semakin meningkat. Perbedaan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan Tahun 2018 terdapat pada partisipasi masyarakat dan serta

[14]Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).
[15] Kantor KPU Kabupaten Malang (Malang, 19 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antusiasme masyarakat dalam mengikuti sosialisasi. Masyarakat kurang menggali informasi seputar kepemiluan, banyak sekali masyarakat yang tidak mengurus akta kematian sanak saudara kepada Dispendukcapil sehingga orang yang sudah meninggal masih tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan dalam dokumen KPU masih tercatat sebagai pemilih tetap. Dan juga banyak masyarakat yang masih mempunyai NIK ganda sehingga mereka tercatat dalam 2 (dua) DPT (Daftar Pemilih Tetap). [16]

Jumlah penduduk di daerah Kabupaten Malang ini relatif tinggi dan mayoritas bertempat tinggal di pedesaan sampai pelosok dan jauh dari pusat pemerintahan. Mereka sulit menjangkau informasi kepemiluan. Kebanyakan dari mereka yang acuh tak acuh atau tidak mengetahui tentang pemilu. Masyarakat berfikir bahwa dengan memilih atau ikut berpartisipasi tidak berdampak apa apa bagi kehidupan mereka. Pemilu itu hanya omong kosong atau mengobral janji saja. Jadi mereka berasumsi sia-sia untuk mengikuti pemilihan tersebut. Masyarakat lebih fokus dalam pekerjaannya yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Mereka lebih menyibukkan diri dengan pekerjaannya di banding mengurusi hal-hal yang berbau politik dan tidak ada sumbangsihnya terhadap kehidupan mereka dan pekerjaan mereka.

Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya dalam meyakinkan masyarakat untuk mengikuti pemilu dan melakukan tindakan pencegaahan adanya golput (Golongan Putih) dalam Pemilihan

[16]Pratitis Nugraha., S.E, Wawancara Kepala Subtansi Bagian Progam dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang (Malang, 20 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gubernur Tahun 2013 dan Pemilihan Gubernur Tahun 2018 atas dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts.KPU-Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor.9/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum ini tidak segan-segan ikut serta dan berpartisipasi terhadap pemilu serta membagi pengetahuan dan informasi seputar kepemiluan agar masyarakat akan sendirinya sadar bahwa berpartisipasi dalam pemilu itu penting agar mereka bisa melindungi hak pilihnya.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts.KPU-Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 angka romawi II bab latar belakang pada poin ke-2 di jelaskan bahwa salah satu keberhasilan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkualitas sangat di tentukan oleh proses Sosialisasi terhadap semua tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi, aturan main Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi dan peran serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur.[17] Poin ke-3 juga menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan pihak-pihak yang terkait dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi, baik Penyelenggara, peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi maupun masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat menghasilkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkualitas.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang membuat trobosan- trobosan yang bertujuan sebagai landasan yang terbuka bagi masyarakat yang tidak paham dengan kepemiluan di antaranya adalah melakuakan validasi yang di laksanakan oleh divisi program data (PRODAT), mereka berkoordinasi dengan lembaga yang terkait tentang data penduduk se-Kabupaten Malang (DISPENDUKCAPIL) karena angka golput di Kabupaten Malang ini di sebabkan oleh angka kematian yang tinggi.[18]

Kebanyakan masyarakat Kabupaten Malang tidak melaporkan ke Dispendukcapil. Peristiwa sangat berpengaruh pada DPT (daftar pemilih tetap) yang senantiasa berubah-ubah. Dispendukcapil melakukan sinkronisasi kembali masyarakat yang telah meninggal dunia dan belum mengurus akta kematian, sehingga nama individu yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pihak dari Komisi Pemilihan Umum

[17] Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts.KPU-Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

[18]Mahardika Narendra Wawancara Komisioner KPU Kabupaten Malang dan Arief Subagyo Divisi Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Malang, (Malang, 19 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kabupaten Malang juga melakukan sosialisasi, Seminar, Workshop dan pendidikan seputar kepemiluan terhadap masyarakat yang di bimbing oleh Komisi Pemilihan Umum Divisi Teknis guna mengenalkan akan pentingnya kepemiluan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik agar pro-aktif dalam kegiatan kepemiluan. Devisi Teknis juga melakuakan pembagian sosialisasi dalam beberapa segmen yang di antaranya adalah segmen pemula, budaya, wartawan, dan komunitas. Wilayah Kabupaten Malang memiliki angka golput yang terbilang tinggi sebesar kurang lebih 26,1% pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018. [19]

Penulis ingin mengetahui perbandingan pemilihan gubernur 2018 dengan tahun sebelumya, apakah pemilihan gubernur tahun 2018 dengan Pemilihan Gubernur sebelumnya itu sudah efektif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, perbandingan kinerja KPU dan strategi KPU dalam mensukseskan pemilihan gubernur tahun 2018 dengan pemilihan gubernur sebelumnya. Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian dengan judul STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG MENEKAN ANGKA GOLPUT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018). Penanganan dalam permasalah golput di Kabupaten Malang diharapkan dapat menerapkan hukum positif di Indonesia.

[19] Mahardika Narendra, Arief Subagyo, (Malang, 19 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka golput (golongan putih) pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah tentang golput (golongan putih)?

C. BATASAN MASALAH

Ruang lingkup penelitian ini hanya fokus pada Perbandingan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018 yang berada di Kabupaten Malang. Penulis memutuskan cakupan dan garis besar materi yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah strategi sosialisasi KPU dalam menekan angka golput dalam pemilihan gubernur 2013 dan 2018

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka golput (golongan putih) pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Golput (Golongan Putih menurut prespektif Fiqih Siyasah

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meluruskan pemahaman masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi wawasan ilmu yang luas dan berkembang bagi para pemikir dan akademisi, praktisi dan politisi seputar permasalahan penekanan angka golput. Serta bisa menjadi dasar, sumber atau acuan bagi peneliti di masa mendatang dan bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

b. Manfaat secara praktis

Penilitian ini di harapkan dapat memberi pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah.

F. DEFINISI OPERASIONAL

a. Strategi

Strategi berasal dari Bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai *"the art of the general"* atau seni seorang panglima yang biasanya di gunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.[20]

Pada abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau

[20]Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pencapaian tujuan. Strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas kesegala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu mengembangkan kekuatan (Ideologi, Politik, Ekonomi, Social-Budaya Dan Hankam) untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. [21]

b. Sosialisasi

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang di kutip oleh sutaryo adalah "proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan, harapan orang lain." Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum di ketahuinya. Seperti belajar norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Menurut pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.[22]

c. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan pemilu. KPU terdiri dari tujuh anggota di tingkat pusat. Anggota KPU dipilih oleh panitia seleksi dan diangkat oleh presiden untuk masa jabatan lima tahun. Sekretariat KPU adalah badan eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolahan organisasi ditingkat pusat. Sekretaris jendral biasanya dicalonkan

[21] Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 139.
[22] Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 230.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh internal KPU dan diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Struktur KPU dan Sekretariat direplikasi di seluruh tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU memiliki sekitar 13.865 staf dan 2.659 anggota di seluruh 531 kantornya.[23]

d. Golput (Golongan Putih)

Setiap pesta demokrasi yang menggunakan pemilihan secara langsung selalu saja ada fenomena yang dinamakan golput. Pada tahun 1971, golput di populerkan oleh sejumlah aktivis dan kelompok pro demokrasi seperti Arief Budiman, Imam Waluyo dan Julius Usman serta Husin Umar. Pemilu pada masa orde baru saat itu mereka menolak terlibat dalam pemilu. Saat itu, pemilu dilihat sebagai kewajiban. Warga negara mempunyai hak pilih dipaksa untuk terlibat atau berpartisipasi sebagai pemilih. Golput (golongan putih) menurut Ramlan Surbakti adalah *" No Voting Decision*" yakni orang yang secara sadar dan sengaja mengambil sikap tidak memberikan suara dalam pemilihan umum dan juga disebabkan oleh kesalahan administrative serta faktor teknis. [24]

Menurut Jindra Piliang bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik atau calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang orang yang kemudian golput. Dia membagi faktor penyebab golput menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *pertama* golput ideologis yakni segala jenis penolakan atas apapun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an,

[23] JPPR bersama Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), Potret Pemilu Akses Dalam Pilpres 2014 di Indonesia: Hasil Pemantauan di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan and Sulawesi selatan, (Digital Lines Distributor, 2015), 14.

[24]Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalmunthe, Yusriati, *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, 15.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk Undang-Undang sekarang, termasuk Undang-Undang pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan sem, *kedua*, golput pragmatis, yakni golput berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya atau tidak percaya. *Ketiga*, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya brubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka. [25]

Menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat 2 (dua) kelompok golput. *Pertama* adalah kelompok golput awam, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ketingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif. *Kedua* adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan

[25]Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalmunthe, Yusriati, *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kualitas partai politik yang atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak Cuma berada pada tingkat deskripsi saja tetapi juga pada tingkat evaluasi.[26]

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Skripsi disusun dengan sistematikan yang terbagi dalam empat bab. Yang terdiri dari sub bab guna lebih memperjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang telah diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah:

Bab pertama, menyajikan pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab kedua didalamnya memuat tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, tinjauan tentang pemilihan umum, golput (golongan putih) menurut islam, Golput (golongan putih) menurut fiqih siyasah, dan partisipasi politik dan teori teori yang akan di jadikan pisau analisis.

Bab ketiga yang berisi pembahasan yang pertama mengkaji tentang pertama, strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput (golongan Putih) dalam pemilihan gubernur tahun 2013 dan 2018, yang kedua tentang golput (golongan putih) menurut fiqih siyasah.

[26]Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalmunthe, Yusriati, *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*, 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab keempat merupakan bab penutup dimana berisikan kesimpulan dan saran serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memberikan pada penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berupa skripsi beberapa mahasiswa yang diperlukan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan yang sama.

1. Skripsi yang berjudul "*Pengguna Hak Pilih Dalam Pemilu (Analisis Terhadap Ketetapan Ijma' Ulama' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia III Tahun 2009*" yang disusun oleh Ghufron, Nim.2102240, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2009.

Penelitian ini berisikan tentang kemunculan Fatwa MUI terhadap Penggunaan hak pilih dalam pemilu serta menjelasakan hukum-hukumnya. Dalam fatwa MUI ini sangat rancu karena banyak terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara fatwa dan dalil-dalil yang di gunakan sebagai dasar hukum, sehingga istinbathnya menjadi lemah. Fatwa MUI ini masih tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mampu dalam menyelesaikan persoalan golput, yang di karenakan fatwa ini tidak menjelaskan tentang golput. Bahkan sebaliknya. Fatwa ini bisa memicu tingginya angka golput dengan melihat isyarat fatwa yang mengatakan bahwasanya wajibnya memilih pemimpin itu harus amanah, jujur, dan aspiratif serta haram, memilih pemimpin yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Sementara kenyataannya menunjukkan banyaknya calon-calon pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan. Penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah suatu hak yang harus dilaksanakan bukan kewajiban yang harus dijalankan hal ini di atur dalam tata urutan hukum di negara ini. Golput adalah sebuah isntrumen realistis politik yang mempunyai kesejarahan panjang dalam setiap pelaksanaan pemilu di negara Indonesia. Atas kerealistisan tersebut golput tidak bisa di sikapi secara sepenggal atau separuh saja tetapi juga harus secara komprehensif karena dalam persoalan golput ini mempunyai masalah yang kompleks dan saling mengikat antara satu dengan yang lain. [27]

2. Skripsi yang berjudul **"***Golput dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi analisis Perilaku Politik Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014)"*. Yang disusun oleh Muhammad Syafi'i, Nim 082211023, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.

   Penelitian ini berisikan tentang penyebab kenaikan angka golput di Karimunjawa yang tidak mengenal figur maupun visi misi bakal calon

[27]Ghufron, "*Fatwa Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu (Analisis Terhadap Ketetapan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa MAjelis Ulama' Indonesia se-Indonesia III Tahun 2009"*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

legislatif di karenakan para calon legislatif tidak melakukan kampanye kewilayah Karimunjawa. Kampanye di nilai mahal karena Karimunjawa jauh dari pusat informasi, ini dijadikan alasan untuk tidak berkampanye. penyebab golput di Karimunjawa ini adalah masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dan semua perekonomian di Karimunjawa ini di angkat oleh mereka sendiri. Mulai dari nelayan, menjual hasil tangkapannya, bidang kepariwisataan, dan bertani, semua itu tidak ada campur tangan pemerintah. Jalan banyak yang sudah rusak dan tak layak, padahal di Karimunjawa ini adalah Taman Nasional yang banyak turis lokalnya maupun manca negara yang mengunjungi. Pencegahan golput selanjutnya adalah masyarakat merasa jika memilih atau tidak memilih tidak berdampak apa-apa bagi kehidupan mereka yang khusunya adalah perekonomian yang lebih menonjol. Mereka berfikir bahwa hari pemilihan ini dirasa tidak penting, daripada untuk memilih lebih baik digunakan untuk mencari nafkah yang sudah jelas ada penghasilan. Banyaknya masyarakat Karimunjawa yang merantau baik bekerja ataupun menuntun ilmu.

Golput dikatakan haram jika masih ada calon pemimpin yang tidak adil dan amanah. Pemilu dalam pandangan islam adalah upaya memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat bagi cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa. Pemilu itu hukumnya fardhu kifayah, memilih pemimpin yang muslim, jujur, amanah, cerdas, serta memperjuangkan aspirasi rakyat adalah wajib,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebaliknya memilih yang selain itu atau tidak memilih sama sekali sementara pemimpin seperti itu ada maka hukumnya haram. [28]

3. Skripsi yang berjudul *"Golput dalam Prespektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Makasar)"*. Yang disusun oleh Kurniawan Ansar, Nim 10200114058, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2019.

   Penelitian ini berisikan Tingkat partisipasi di kota Makassar cenderung lebih tinggi, karena kebanyakan masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Makassar adalah manyarakat menengah kebawah, berbeda dengan lingkungan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berintelektual yang jumlah partisipasi politiknya cenderung rendah. Peristiwa terjadi di salah satu kecamatan yaitu kecamatan Tamalanrea tingkat partisipasi politik masyarakat sangat rendah dari data yang telah dipaparkan oleh KPU kota Makassar menunjukkan hanya 45% masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Faktor yang mempengaruhi adanya golput di kota makassar yang terjadi dikalangan masyarakat intelektual adalah sebagai berikut:

   a) Apatis (masa bodoh), sikap ini lebih dari sekedar manifestasi kepribadian otoriter, sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, bagi masyarakat kota Makassar kegiatan politik tidak memberikan mafaat dan kepuasan, sehingga mereka tidak punya minat dan perhatian terhadap politik.

[28] Skripsi Muhammad Syafi'i, "*Golput dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi analisis Perilaku Politik Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014)"*, jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Anomi (terpisah). Sikap ini merujuk kepada sikap ketidakmampuan, terutama kepada keputusan yang dapat diantisipasi. Masyarakat kota Makassar masih mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang beragama, akan tetapi ia merasa tidak dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik. Singkat kata, anomi adalah sikap jika hal ini menjadi ekstern dan meluas akan mencakup suatu perasaan ketidakberdayaan dalam mengandalkan hidup secara umum.

c) Alienasi (terasing), sikap ini berbeda dari apatis dan anomi. Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Masyarakat kota Makassar yang teralieansi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, akan tetapi ia jga dapat mengambil alternative untuk menggulingkan kekuasaan dengan car acara kekerasan, atau dengan cara tanpa kekerasan atau melakukan hijrah.

Menurut fatwa MUI yang mengharamkan golput justru tidak memengaruhi atau berhubungan langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih atau tidak, karena masyarakat memilih atau tidak memilih itu keterlibatan dalam memilih itu bukan karena dorongan agama, tetapi karena dorongan kalkulasi politik yang mereka miliki, kalaupun mereka memilihdapat apa dan kalau dipilih dia memamg menang bagaimana. Jadi masyarakat cenderung apatis dalam konteks pemilu secara umum dan fatwa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu sendiri tidak mengikat dan masyarakat punya hak untuk tidak mentaati, karena fatwa politik, meskipun itu dalam lembaga negara. [29]

4. Skripsi yang berjudul: "*Golongan Putih (Golput) menurut Pandangan Elit Politik Islam di Malaysia"*. Disusun oleh Mohd Ridzuan Mohamad, Nim 109045200010, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011.

   Penelitian ini berisikan, golongan putih yang berada di malaysia adalah suatu kajian oleh elit politik semenjak dahulu sampai saat ini. Dalam masa yang sama golput ini tidak terlepas pada negara negara lain. Bagi negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demikrasi ditinjau dari sudut sejarah perkembangannya adalah melibat beberapa faktor, yang lebih memfokuskan adalah keterkaitan antara pemilihan umum dan sistem pemerintahan demokrasi. Karakter golongan putih yang berada di Malaysia ini adalah semakin meningkatnya pada masa itu, golongan elit politik islam dengan berbagai pandangan, mereka memfokuskan penyebab terjadinya adalah kejahilan, kejumudan, dan terpengaruhnya ideologi tradisioanal atau colonial barat yang memberi kesan terhadap masyarakat saat ini. Dan golongan putih ini tidak terlepas dari implementasi hukum islam yang khusunya pada fiqih siyasah. Dalam massa yang sama agama rasmi bagi negara Malaysia adalah agama islam, maka keterkaitan hukum-hukum islam

[29] Skripsi Kurniawan Ansar *"Golput dalam Prespektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Makasar)***",** Kurniawan Ansar, Nim 10200114058, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap golongan putih menjadi pembahasan tersebut ada yang menghukumkan harus, wajib dan haram sebagainya. Golongan putih juga tidak terlepas dari Undang-Undang di Malaysia, tentunya melibatkan undang-undang dalam pemilihan umum.[30]

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Gufron, Nim 2102240, Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2009. *"Fatwa Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu (Analisis Terhadap Ketetapan Ijma' Ulama' Komsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia III Tahun 2009) "*	1. Latar belakang kemunculan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang penggunaan Hak Pilih? dalam Pemilu 2. Bagaimana Istinbath hukum fatwa yang digunakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) ?	• Penelitian ini berisikan tentang kemunculan Fatwa MUI terhadap Penggunaan hak pilih dalam pemilu serta menjelasakan hukum-hukumnya. • Dalam fatwa MUI ini sangat rancu karena banyak terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara fatwa dan dalil-dalil yang di gunakan sebagai dasar hukum, sehingga istinbathnya menjadi lemah.	• Skripsi ini berbeda dengan Skripsi penulis di lihat dari latar belakang dan metode penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini lebih mengetahui kemunculan fatwa serta istinbath hukum tentang penggun	• Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada tinjauan fiqih siyasah dan fatwa MUI yang sangat rancu karena banyak terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara fatwa dan dalil-dalil yang di gunakan sebagai dasar hukum

[30]Skripsi Muhammad Ridzuan Mohamad *"Golongan Putih (Golput) menurut Pandangan Elit Politik Islam di Malaysia*, Nim 109045200010, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun, 2011.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				aan hak pilih.	
2.	Muhammad Ridzuan Bin Mohammad, Nim 1090452000210, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011 "*Golongan Putih (Golput) Menurut Pandangan Elite Politik Islam di Malaysia"*	1. Bagaimanakah penerapan hukum islam tentang golongan putih di dalam konsep fiqih siyasah di Malaysia? 2. Bagaimana pandangan golongan elite politik islam terhadap kegiatan golongan putih di Malaysia? 3. Bagaimana undang-undang yang terkait dengan golongan putih?	• Karakter golongan putih yang berada di Malaysia ini adalah semakin meningkatnya pada masa itu, golongan elit politik islam dengan berbagai pandangan, mereka memfokuskan penyebab terjadinya adalah kejahilan, kejumudan, dan terpengaruhnya ideologi tradisioanal atau colonial barat yang memberi kesan terhadap masyarakat saat ini. Dan golongan putih ini tidak terlepas dari implementasi hukum islam yang khusunya pada fiqih siyasah.	• Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada tingkat ke golputan di era modern dan di masa elit politik islam yang menyebabkan kejumudan dan kejahilan serta terpengaruhnya ideologi tradisional colonial barat. • Penulis lebih membahas tentang penekan	• Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada tingkat ke golputan di era modern dan di masa elit politik islam yang menyebabkan kejumudan dan kejahilan serta terpengaruhnya ideologi tradisional colonial barat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				an angka golput dan penelitian ini lebih ke dalam elite politik dalam negara Malaysia	
3.	Muhammad Syafi'i, NPM 082211023, jurusan jinayah siyasah fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015 "*Golput dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi analisis Perilaku Politik Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014) "*	1. Mengapa golput terjadi dalam Pileg 2014 di Karimunjawa? 2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap golput ?	• Penelitian ini berisikan tentang penyebab kenaikan angka golput di karimunjawa yang tidak mengenal figur maupun visi misi bakal calon Legislatif. Hal ini di karenakan para calon Legislatif tidak melakukan kampanye kewilayah Karimunjawa • Kampanye di nilai mahal karena Karimunjawa jauh dari pusat informasi, dan ini dijadikan alasan untuk tidak berkampanye.	• penelitian ini lebih kedalam prespektif fiqi siyasah, dan penulis membahas lebih kedalam keputusan yang dibuat oleh KPU (KKPU).	• Unsur kebaruan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah tinjaun fiqih siyasah tentang golput serta fatwa-fatwa dan pendapat dari kalangan ulama'.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			penyebab golput di Karimunjawa ini adalah masyarakat merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dan semua perekonomian di Karimunjawa ini di angkat oleh mereka sendiri.		
4.	Kurniawan Ansar, Nim 10200114058, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraam. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2019 "*Golput dalam Prespektif Siyasah Syariah (Studi Terhadap Perilaku Politik Masyarakat, Kota Makasar) "*	1. Bagaimana eksistensi golput jika dikaitkan dengan demokrasi yang sedang terjadi di kota Makassar? 2. Mengapa golput menjadi salah satu pilihan politik masyarakat di kota Makassar? 3. Bagaimana golput dalam prespektif siyasah syariah dengan pendekatan maqhosid Syari'ah?	• Penelitian ini berisikan Tingkat partisipasi di kota Makassar cenderung lebih tinggi, karena kebanyakan masyarakat yang bertempat tinggal di kota Makassar adalah manyarakat menengah kebawah , berbeda dengan lingkungan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berintelektual yang jumlah partisipasi politiknya cenderung rendah.	• Perbedaan dalam tempat untuk meneliti • Perbedaan dalam sudut pandang, peneliti memiliki sudut pandang terhadap fiqih siyasah sedangkan penulis bersudut pandang pada keputusan KPU (KKPU)	• Unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilian Umum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Tinjauan Pustaka

a) Pemilu

Pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi didalam sistem demokrasi perwakilan modern. Sebuah instrument yang deperlakukan bagi partisipasi ialah sistem pemilu, jika pemilu ini tidak memperbolehkan warga negara untuk menyatakan pilihan-pilihan dan preferensi politik politik mereka, maka pemilu bisa menjadi kegiatan yang hampir tidak bermakna. Menurut Paimin Napitupulu "Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang tua sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan dan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, semua ini merupakan proses pemilu. Melalui pemilu, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan".[31]

Sistem pemilu memiliki dua prinsip pokok yaitu: Sistem Distrik (*Single-member Constituence)* dan Sistem Perwakilan Berimbang / Proporsional (*Multi- member constituency*).

a. Sistem Distrik (*Single-member Constituence)*

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut

[31] Yoyoh Rohaniah Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 438.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

distrik karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen, untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Kursi diraih oleh pemenang tunggal meskipun selisih suara dengan partai lain hanya sedikit. Suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang *(wasted)* dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik lain.[32]

Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen. Kelemahan sistem ini dianggap kurang memperhatkan kepentingan partai-partai kecil dan kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam satu distrik akan kehilangan suara yang telah mendukungnya. Dalam artian bahwa suara calon yang kalah tidaklah diperhitungkan dan terbuang sia-sia.[33]

b. Sistem Perwakilan Berimbang / Proporsional (*Multi- member constituency*).

Sistem proporsional, satu wilayah besar (daerah pemilihan) memilih beberapa wakil. Satu wilayah diangap sebagai satu kesatuan dan dalam

[32]Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 137.
[33]Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 137.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional tanpa menghiraukan distribusi suara itu.

Sistem proporsial dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Tidak ada suara yang terbuang karena seluruh suara tebagi habis untuk perolehan hingga kursi terakhir didaerah pemiliham. Itulah sebabnya sehingga sistem ini dipandang sebagai sistem yang lebih demokratis karena tanpa ada kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kuri dalam parlemen, tanpa suara yang hilang. Akibatnya, semua golongan dalam masyarakat memiliki peluang yang sama untuk mendudukkan wakilnya diparlemennya. Dan rasa keadilan dalam masyarakat lebuh terpenuhi.

Berbeda dengan sistem distrik karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh konstituantennya sehingga hubungannya dapat lebih erat dan wakil lebih cenderung memperjuangkan kepentingan konstituantenya. Sedangkan dalam sistem proporsional, karena daerah pemilihan yang luas, maka hubungan antara wakil dan konstituen cenderung renggang. disebabkan karena selain wilayah yang luas, jumlah pemilih yang besar juga menjadikan sukar untuk dikenali sehingga berdampak pada rendahnya perhatian si wakil untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya.

Sistem dilaksanakan pada umumnya dalam dua metode, yaitu metode *single transferable vote (hare system)* dimana pemilih di beri kesempatan untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, dan seterusnya.[34]

b) Latar belakang golput

Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses yang dinilai efektif dalam rangka menghasilkan pemimpin bangsa. Akan tetapi, hasil pemilu melahirkan kekecewaan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. kekecewan tersebut disuarakan oleh banyak pihak, termasuk sebagian umat islam. Kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemimpin antara lain melahirkan sikap abstain dalam pemilu. lebih jauh dari itu, sikap tidak mau berpartisipasi dalam pemilu itu diungkap secra atraktif sehingga secara emplisit, seolah pihak-pihak yang kecewa terhadap hasil pemilu yang lalu melakukan kampanye dan mengajak pihak lain agar tidak berpartisipasi dalam pemilu. mereka menolak berpartisipasi dalam pemilu yang dinyatakan di media massa, menyebut dirinya sebagai kelompok golput. Ketidakpuasan itu muncul karena *pertama,* sebagian anggota masyarakat menilai bahwa anggota legislative lebih mewakili kepentingan partainya daripada mewakili rakyat yang memilihnya. Gugatan yang sering muncul adalah apakah anggota legislatif itu wakil rakyat atau wakil partai politik. *Kedua,* pemilu tidak bisa dihindarkan dari politik uang: tapi hampir tidak pernah bisa di buktikan secara hukum. Oleh karena itu

[34]Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 137.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembagian uang dalam berbagai modus operandi dalam rangka menarik simpati masyarakat dapat dilihat di banyak tempat. [35]

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu melalui hangat disuarakan oleh banyak pihak. Sebagian ulama memandang bahwa hukum turut serta dalam pemilu adalah wajib. Sikap golput dalam pemilu di hukumi haram. Sebagian ulama tidak berpendapat demikian. Menurut M. Atho Mudzhar (Guru Besar Sejarah Sosial Hukum Islam). Terdapat empat jenis produk pemikiran hukum islam yang dikenal dengan perjalanan sejarah hukum islam, yaitu kitab-kitab fiqih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan-peraturan perundang-undangan di negeri muslim, fatwa-fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum islam itu mempunyai khasnya sendiri. [36]

Kitab-kitab sebagai jenis produk pemikiran hukum islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum islam, diantara cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Sepanjang sejarah ini terbukti bahwa beberapa buku fiqih telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun ketika kitab-kitab fikih itu di tulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Produk pemikiran hukum islam yang berupa keputusan-keputusan pengadilan agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. ciri keputusan peradilan agama adalah tidak mencakup semua

[35] Jaih Mubarok, *Fiqih Siyasah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), 60.
[36] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah*, 62.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

aspek pemikiran hukum islam seperti halnya fikih. Tetapi dari segi kekuatan hukumnya, ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan. [37]

Produk pemikiran hukum islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara islam bersifat mengikat: bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fukaha' tetapi juga para politisi dan cendikiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit. Produk pemikiran hukum islam yang berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia, bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, diberikan kepadanya. Masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa. Karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa: meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis. [38]

Fatwa dapat diposisikan sebagai salah satu produk hukum islam yang bersifat relatif, tidak mengikat, dan bersifat dinamis karena berkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun secara bersama sama. Fatwa dapat juga dikelompokkan sebagai *fikih waqi'iyat* dan tidak layak dikelompokkan kedalam fiqih *taqdri*.

[37] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah*, 63.
[38] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah*, 63.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Definisi dan Pandangan Golput

Golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sejumlah orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. pemilu sebelum tahun 2004 di Indonesia selalu dilakukan dengan memilih tanda gambar partai peserta pemilu. yang dipilih oleh masyarakat bukanlah gambar atau foto calon wakilnya, tetapi gambar partai. Golput didefinisikan sebagai kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya salah satu partai peserta pemilu. pengertian ini tentu saja akan terus berkembang sesuai dengan konteks dan situasinya. Golput adalah sebutan bagi orang atau kelompok orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya. [39]

Golput memiliki pandangan tersendiri tentang tuduhan miring sebagian pihak terhadapnya. Tuduhan bahwa mereka termasuk orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab, kelompok putus asa, tidak mau ambil resiko, mau enak sendiri, tidak peduli, atau barisan sakit hati, dibantah dengan mengatakan bahwa golput memang dapat menyalahkan pihak manapun atas suatu persoalan yang terjadi. Mereka merasa tidak ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Menyebut golput sebagai kelompok putus asa, mungkin ada benarnya. tetapi, apakah mereka juga termasuk kelompok yang tidak bertanggung jawab? Menurut B.M Wibowo (Ketua Forum Golput Indonesia), sikap tidak memilih adalah tanggungjawab yang mereka tunjukkan, karena dalam pemilu sebelumnya mereka tidak tepat dalam memilih. Pemilu

[39] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah*, 64.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2004 merupakan babak baru dalam demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi yang menganut sistem pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Disamping itu, rakyat pun harus memilih wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif. [40]

d) Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu parta atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan *(contacting)* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. [41]

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan. M. Nelson dalam *No Easy Choic: Political Participal Participation Developing Countries:* "partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal. Efektif atau tidak efektif. [42]

Negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep pertisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui

[40] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah*, 64.
[41] Miriam Budarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 2.
[42] Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kepemimpinan Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficacy*. Negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiata-kegiatan itu.[43]

Tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, lagi pula dikhawatirkan bahwa jika pelbagai pendapat kurang mendapat kesempatan untuk dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakatdan cenderung untuk melakukan beberapa kepentingan kelompok saja.

[43] Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif. Huntington Nelson menganggap bahwa kegiatan yang ada unsur detruktifnya seperti demonstrasi, terror, pembunuhan politik, dan lain-lain.[44]

e) Teori Perundang-Undangan

Ilmu (pengetahuan) Perundang-undangan tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental sejak tahun tujuh puluhan. disebabkan oleh sistem hukum kodifikasi (kodified law system). Mungkin pula disebabkan oleh perkembangan teori hukum positif (legisme) yang lebih "menghargai" hukum yang dibentuk oleh (pejabat) pemerintah ketimbang hukum yang berkembang melalui kasus-kasus dan dibentuk oleh pengadilan. Menurut A Hamid S Atamimi, perlu dibedakan antara istilah ilmu perundang-undangan atau *Gesetzgebungswissenscaft* atau juga disebut ilmu perundang-undangan dalam arti luas, dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit *Gesetzsgebungslehr*.

Ilmu pengetahuan perundang-undangan meliputi ilmu perundang-undangan (arti sempit) dan teori perundang-undangan atau *Gesetgebungstheorie.* dalam membedakan antara ilmu perundang-undangan dengan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif, sedangkan ilmu perundang undangan (dalam arti sempit) berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normative. Jadi baik ilmu perundang-undangan atau teori perundang-undangan merupakan cabang atau bagian dari ilmu pengetahuan perundang undangan. Secara

[44] Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

spesifik, yang akan dibahas adalah mengenai ilmu perundang-undangan, pembahasannya yang mencakup peristilahan dan ruang lingkup bahasan, norma hukum, norma hukum dalam negara, sistem norma hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan, lembaga negara dan lembaga pemerintahan dalam baik sebelum ataupun sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jenis peraturan perundang-undangan, fungsi peraturan perundang-undangan, materi muatan dan asas pembentukannya.[45]

Norma hukum tidak dapat dipisahkan dari ilmu perundang-undangan karena melalui perundang-undangan, norma hukum tersebut dapat lahir dan berlaku dalam masyarakat. sebelumnya akan dilakukan pembedaan terlebih dahulu antara norma hukum dan norma-nrma lainnya yang berlaku di masyarakat. norma hukum itu sangat berkaitan dengan hierarki norma hukum, baik yang sudah dinyatakan oleh Hans Nawiasky ataupun Hans Kelsen. Teori "berwajah ganda" yang dikemukakan oleh Adolf Merkel untuk menjelaskan keterkaitan antara satu norma dengan norma liannya. Sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang terus menerus dimulai dari yang abstrak, menujukan hukum yang positif. seterusnya menjadi nyata. Semua norma merupakan satu kesatuan dengan struktur piramida. Dasar keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang paling tinggi tingkatannya. Jadi menurut Hans Kelsen urutan norma itu dimulai dar *Grundnorm* atau *Ursprungsnorm* ke *Generallenorm*, kemudian positifkan. Sesudah itu akan menjadi norma nyata

[45]Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju, 1998), 13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(Concretonorm). Norma nyata lebih bersifat individual. Norma positif merupakan perantara dari norma dasar dengan norma individual, maka disebut juga norma antara *(Tussenorm).* Norma dasar merupakan dimana orang itu tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh menghina, dan lain lain.[46]

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, dalam artian norma yang lebih rendah bersumber dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut akan terus membentuk suatu tingkatan hingga norma teratas yang sudah tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotesis, fiktif, yang disebut sebagai dasar atau *Groundnorm*. Norma ini bersifat *presupposed* artinya ditetapkan oleh masyarakat secara bersama sama. Selain Hans Kelsen Hans Nawasky juga mengeluarkan teori tentang jenjang norma dalam negara yang terbagi dalam kelompok kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok I : *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara
2. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara
3. Kelompok III : *Formell Gesetz* atau undang undang formal
4. Kelompok IV : *Verordnug & Autonome Satzung* atau aturan pelaksana dan aturan otonom.

Terdapat beberapa hal yang membedakn teori jenjang norma menurut Hans Kelsen dengan Hans Nawiasky meliputi:

[46]Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, 26.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Teori Hans Kelsen berlaku untuk segala jenis norma, sedangkan Hans Nawiasky lebih fokus pada norma hukum negara
2. Norma tertinggi menurut Hans Kelsen adalah Grundnorm yang tidak akan pernah bisa berubah, sedangkan norma tertinggi menurut Hans Nawaisky adalah Staatsfundamentalnorm yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan.
3. Hans Kelsen hanya membagi norma dalm jenjang-jenjang saja, sedangkan Hans Nawaisky juga melakukan terhadap norma tersebut, tidak hanya membagi dalam jenjang. [47]

f) Teori Kebijakan Publik

Catrl J.Federick sebagaimana di kutip Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, Karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.[48]

Menurut Easton memberikan definisi kebijakan public sebagai *the authoritative al-location of values for the whole society* atau sebagai

[47]Sony Maulana Sikumbang dkk. *Modul Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, 37.
[48]Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta Barat : Universitas Moestopo Baragama (Pers), 2014), 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Leswell dan Kalpan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Presman dan Widavsky mengartikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondidi awal dan akibat yang bisa diramalkan. Robert Eystone mengartikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya. Kebijakan publik memiliki banyak kategori diantara menurut Sholichin Abdul Wahab sebagaimana di kutip suharno merinci kebijakan publik dalam beberapa kaktegori di antaranya adalah:

a. Tuntunan kebijakan *(Policy Demonds)*

   Tuntutan atau desakan yang di ajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta atau kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebagainya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintahan berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu berbuat sesuatu terhadap suuatu masalah yang terjadi dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan *(Policy Decision)*

   Keputusan kebijakan adalah keputusan yang di buat oleh pejabat pemerintah yangyang di maksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan poblik. Hal ini didalamnya termasuk keputusan keputusan untuk menciptakan statute (ketentuan-ketentuan dasar),

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.[49]

c. Pernyataan kebijakan *(Policy Statemens)*

Pernyataan kebijakan adalah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan public tertentu. Misalnya, ketetapan MPR, Keputusan Presiden, atau dekrit Presiden, keputusan peradilan, dan peryataan ataupun pidato pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan *(Policy Outpust)*

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hall-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan.

e. Hasil akhir kebijakan *(Policy Outcoms)*

Adalah akibat atau dampak yang benar benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan pemerintah dalam bidang bidang atau masalah masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. [50]

[49]Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, 2.
[50]Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan sengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. [51] Istilah metodelogi berasal dari metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang di pergunakan dalam penelitian dan penelitian. [52] Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah diemukan.[53] Peneliti

[51] Cholid Narbuko an Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.
[52] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), 5.
[53]Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan beberapa metode guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[54] Arti lain adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarkat. Maksudnya untuk mengetahui fakta-fakta secara nyata dan data yang di butuhkan. Data yang dibutuhkan terkumpul maka menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[55]

B. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Kasus *(Case Aprroach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Aprroach*), perlu dipahami oleh peneliti adalah *Ratio decidendi*, yaitu, alasan alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio*

[54] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.
[55] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif, bukan deskriptif. Sedangkan dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karean itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *Ratio Decidendi.* [56]

b) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach)*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang. Peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

[56] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* 11.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang paling penting dalam penelitiaan. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari data yang telah diperoleh dalam suatu penelitian dimana jika terjadi kesalahan dalam pengambilan data maka akan meleset dari yang diharapkan.[57] Ada 3 (tiga) jenis sumber data yang di gunakan dalam penelitian yaitu

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, [58] bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, diantaranya adalah :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia

[57]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, kebijakan public, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2013), 129.
[58]Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineke Cipta, 1999), 52.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts.KPU-Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor.9/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Tetapi berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dibilangkan sebagai hukum positif bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil yang berasal dari informasi yang relevan dalam permasalahan hukum tetapi tidak dapat dikatakan sebagai aturan-aturan hukum yang pernah diundangkan atau diumumkan sebagai prodek badan-badan legislatif, yudikatif, eksekutif dan/atau administrasi negara. [59]

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di laksanakan di, Kabupaten Malang, alasan peneliti memilih Kabupaten malang adalah karena di Kabupaten Malang memiliki

[59] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode,* 83.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penduduk yang cukup banyak dan kebanyakan bertempat di daerah terpencil sampai pelosok desa yang mengakibatkan mereka kurangnya mendapatkan informasi dimana akses tempat tinggal ke pusat pemerintahan terlalu jauh dan susah dijangkau. Masyarakat sedikit tidak tahu dalam berpolitik dan akan pentingnya pastisipasi masyarakat. alasan kedua karena peneliti berasal dari Kabupaten Malang. Peneliti juga melaksanakan di penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Jawa Timur yang berlokasi di Kepanjen, yang beralamat di Jl. Panji No.119 Kepanjen Kabupaten Malang.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1) Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.[60] Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :
   a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yaitu Anis Suhartini ST.
   b. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Divisi Humas Dan Parmas yaitu Mahardika Narendra.
   c. Kepala Subtansi Bagian Progam dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yaitu Pratitis Nugraha., S.E

[60] Amiruddi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006), 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yaitu Arief Subagyo., S.E., MM

e. Kepala Subtansi Bagian Hukum yaitu Feri Setiawan., S.E

f. Andri Puguh. Staf KPU Kabupaten Malang Devisi Progam dan Data

g. Angga Aris Sutanto Staf KPU Kabupaten Malang Devisi Umum

h. Luxman Didi Setiawan Staf KPU Kabupaten Malang Devisi Umum

2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. [61]

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data Untuk memperoleh data secara lengkap, peneliti menggunakan teknik pengumpulan Data Primer, dan data sekunder. Data primer yang terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambal bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.[62] Wawancara dilakukan untk memperoleh keterangan lisan guna untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan data dan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab oleh peneliti

[61]Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanamidita Offset, 1983), 56.
[62]Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, kebijakan public, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, 133.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada narasumber sesuai dengan draft pertanyaan yang telah dibuat terkait dengan implementasi sistem informasi data KPU Kabupaten Malang. Adapun pengelolahan data di telusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada:

a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yaitu Anis Suhartini ST.
b. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Divisi Humas Dan Parmas yaitu Mahardika Narendra.
c. Kepala Subtansi Bagian Progam dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yaitu Pratitis Nugraha., S.E
d. Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yaitu Arief Subagyo.,S.E., MM
e. Kepala Subtansi Bagian Hukum yaitu Feri Setiawan., S.E
f. Andri Puguh. Staf KPU Kabupaten Malang Devisi Progam dan Data
g. Angga Aris Sutanto Staf KPU Kabupaten Malang Devisi Umum
h. Luxman Didi Setiawan Staf KPU KAbupaten Malang Devisi Umum.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Teknik bermanfaat untuk :

1. Mengukur kebenaran jawaban pada wawancara.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan wawancara atau angket. [63]

Observasi dilakukan untuk mengetahui strategi sosialisasi KPU Kabupaten Malang Menekan Angka Golput Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dilakukaknnya observasi akan mendapatkan sejumlah informasi dan data secara rinci secara jelas.

3. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupum dari perorangan. Dokumentasi penelitian merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk penguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan, dokumen pribadi dan dokumen resmi. [64]

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. [65] Kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau kalimat yang benar, teratur, cermat, beruntun, logis, tidak tumpeng tindih dan efektif sehingga dapat

[63]Eko Budiarto, SKM & Dewi Anggraeni, *Pengantar Epidemiologi Edisi 2,* (Jakarta : Kedokteran EGC, 2003), 45.
[64]Albi anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), 45.
[65]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian,* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 26.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memudahkan pemahaman dan interpretasi data. [66] adapun tahapan menganalisis data adalah:

1) *Editing/*edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataanya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum terpenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang terlewatkan. [67]

2) *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis maka peneliti melakukan klasifikasi dari hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

3) *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.[68] Tahap verifikasi adalah tahap pembuktian kebenaran data yang untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokan dan mendengarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisandari hasil wawancara peneliti ketika wawancara. Disamping itu data peneliti memverifikasinya dengan cara *triagulasi*, adalah

[66]Tim Penyusun *Pedoman Karya Penulisan Ilmiyah Fakultas Syariah*, 148.
[67]Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta : Rieneka Cipta, 200), 182.
[68]Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mencocokkan antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4) Analisis data

Analisis data adalah menganalisis dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesisi kerja. Dalam analisis bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang dijelaskan diatas, maka penulis mengelola dan menganalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data., megorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dana pa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat di ceritakan orang lain.[69]

Tahap ini peneliti mendeskripiskan strategi Sosialisasi KPU Kabupaten Malang dalam menekan angka golput Pemilihan Gubernur jawa timur. Kemudian data dan informasi yang telah diperoleh di analisis sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts.KPU-Prov-014/2013 Nomor. 2 Poin a-g Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor.9/PP.02.3-

[69]Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kpt/35/Prov/IX/2017 Huruf B Angka 1-9 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian setelah langkah langkah di atas. Yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian in

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografi Wilayah Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur, ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen. Kabupaten Malang itu sendiri memiliki luas 3.526 Km^2. Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112□17-112□57 Bujur Timur 7□44-8□26 Lintang Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran tinggi yang di kelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (Mdpl) yang terletak di bagian tengah. Daerah datarang tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-600 meter (dpl) dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl. [70]

Dilihat dari topografinya, Kabupaten Malang terdiri dari gunung-gunung yang dikenai dan telah diakui secara nasional, satu diantaranya gunung tertinggi di pulau Jawa. Gunung-gunung tersebut adalah gunung kelud (1.731 m), Welirang (3.156 m), Arjuna (3.339 m), Semeru gunung tertinggi di pulau Jawa dengan ketinggian (3.676 m), dan masih banyak lagi yang belum dikenal secara nasional. Kondisi topografis Kabupaten Malang memiliki kelerengan antara 2-15% dan sebagian kecil memiliki kelerengan antara 0-2%. Kabupaten Malang berada pada ketinggian 0-3.600 meter diatas permukiman air laut. Apabila di tinjau dari morfologinya, daerah yang berada pada kondisi landau hingga pegunungan berada pada kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pakisaji, sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan. Sedangkan daerah bergelombang berada pada Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Wagir, dan Wonosari. Semakin mendekati pantai umumnya memiliki karakteristik daerah pegunungan kapur, dengan tingkat kemiringannya cukup besar. Tingkat keterangan wilayah berkisar antara 2-15%, 15-40% dan > 40% hal ini dapat diindikasikan bahwa pada wilayah < bergelombang sampai terjal. Untuk kelerangan> 40% yang sebagian besar meliputi Kecamatan Ampelgading dan Tirtoyudo merupakan daerah yang harus diutamakan karena memiliki fungsi

[70] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang (diakses pada Tanggal 25 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai perlindungan terhadap tanah dan air serta menjaga ekosistem lingkungan hidup. [71]

Sungai-sungai yang mengalir di daerah kabupaten Malang antara lain sungai Brantas yang bermata air di daerah Dukuh. Posisi wilayah Kabupaten Malang terletak pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi daerah perlembahan atau dataran rendah, sedangkan daerah dataran tinggi pada ketinggian antara 500 sampai 3.600 meter di atas permukaan laut yang terdapat di daerah Malang Selatan, lereng Tengger Semeru dan disekitar lereng Gunung Kawi dan Arjuno.

Administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Malang terdiri atas 33 Kecamatan. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malang adalah: Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karengploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan 6 (enam) kabupaten di Jawa Timur. Adapun batas-batas wilayah di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, dan Kota Batu

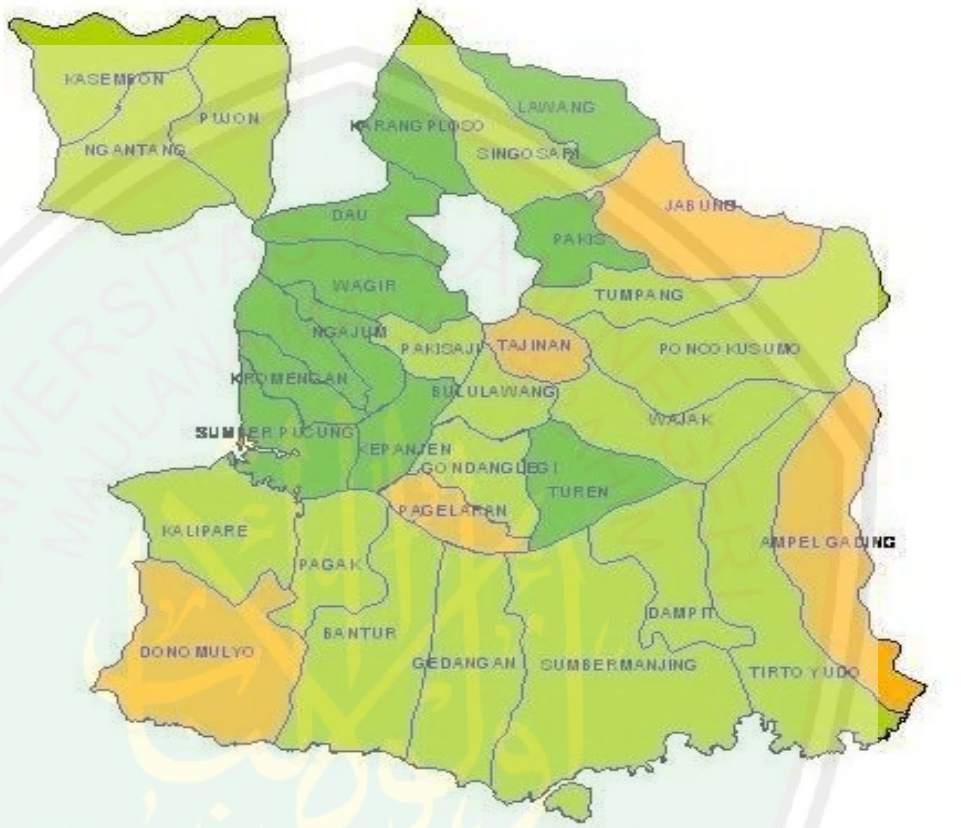
Sebelah Selatan : Samudra Hindia

[71] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang (diakses pada tanggal 25 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar

Sebelah Barat : Kabupaten Kediri dan Blitar [72]



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Malang

2. Kondisi Demografi Wilayah Kabupaten Malang

Unit administrasi pemerintahan dibawah kabupaten adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi wilayah beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun Rukun Warga (RW) Rukun Tetatngga (RT). Secara rinci wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi habis kedalam 3.035 RW dan 13.906

[72] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang (diakses pada tanggal 25 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

RT. Roda pemerintahan berjalan lancar dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi derap pembangunan. Sebagai salah satu indikasi pencapaian kemajuan pembangunan dapat dicermati melalui tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa/kelurahan merupakan cermin kemandirian dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada sebagai pelaku maupun sebagai sasaran pembangunan. Salah satu tolak ukur kemampuan SDM adalah tingkat pendidikan. Kepala desa dengan tingkat pendidikan di tahun 2015 adalah SMP sekitar 13,2 persen, SMU sekitar 56,7 persen, akademi 3,51 persen, dan Universitas 26,49 persen.[73]

Menurut hasil proyeksi penduduk Kabupaten Malang tahun 2015 berjumlah 2.544.315 jiwa. Jumlah tersebut terdiri laki-laki 1.278.511 (50,24 persen) jiwa, dan perempuan 1265.804 (49,76 persen) jiwa. Berdasarkan komposisi umurnya maka penduduk Kabupaten Malang termasuk Penduduk Intermediate. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sekitar 24,07 persen (dibawah 30 persen), Sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama.). maka penduduk Kabupaten Malang tergolong tua dengan umur median pada kisaran 30-34 tahun. Sementara umur median Intermediate berada pada kelompok 20-30 tahun dan

[73] Pedoman Profil Kabupaten Malang (26 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

umur median muda adalah 20 tahun kebawah. Dengan komposisi umur produktif (15-64 tahun) sekitar 68,12 persen.[74]

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan luas wilayah di Kecamatan Kabupaten Malang.

Kecamatan *Subdistrict*	Luas Wilayah *Total Area*		Penduduk *Population*		Kepadatan Penduduk (orang/km²) *Population Density (per sq km)*
	km²	%	Jumlah *Total*	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010. Donomulyo	192,60	6,47	62 627	2,43	325,17
020. Kalipare	105,39	3,54	60 180	2,34	571,02
030. Pagak	90,08	3,03	45 740	1,78	507,77
040. Bantur	159,15	5,35	68 891	2,67	432,87
050. Gedangan	130,55	4,39	53 132	2,06	406,99
060. Sumbermanjing	239,49	8,04	90 275	3,50	346,95
070. Dampit	135,31	4,55	118 921	4,62	878,88
080. Tirtoyudo	141,96	4,77	60 876	2,36	428,86
090. Ampelgading	79,60	2,67	52 426	2,03	658,62
100. Poncokusumo	102,99	3,46	92 797	3,60	901,03
110. Wajak	94,56	3,18	81 047	3,15	857,10
120. Turen	63,90	2,15	114 698	4,45	1 794,97
130. Bululawang	49,36	1,66	71 924	2,79	1 457,13
140. Gondanglegi	79,74	2,68	85 546	3,32	1 072,81
150. Pagelaran	45,83	1,54	67 631	2,62	1 475,70
160. Kepanjen	46,25	1,55	107 955	4,19	2 334,16
170. Sumberpucung	35,90	1,21	54 418	2,11	1 515,82
180. Kromengan	38,63	1,30	38 187	1,48	988,53
190. Ngajum	60,12	2,02	49 309	1,91	820,18
200. Wonosari	48,53	1,63	41 361	1,60	852,28
210. Wagir	75,43	2,53	89 450	3,47	1 185,87
220. Pakisaji	38,41	1,29	90 140	3,50	2 346,79
230. Tajinan	40,11	1,35	54 346	2,11	1 354,92
240. Tumpang	72,09	2,42	75 605	2,93	1 048,76
250. Pakis	53,62	1,80	160 763	6,24	2 998,19
260. Jabung	135,89	4,56	74 529	2,89	548,45
270. Lawang	68,23	2,29	111 844	4,34	1 639,22
280. Singosari	118,51	3,98	183 415	7,12	1 547,68
290. Karangploso	58,74	1,97	84 822	3,29	1 444,02
300. Dau	41,96	1,41	77 860	3,02	1 855,58
310. Pujon	130,75	4,39	68 184	2,65	521,48
320. Ngantang	147,70	4,96	56 418	2,19	381,98
330. Kasembon	55,67	1,87	31 279	1,21	561,86
Kabupaten Malang	2 977,05	100,00	2 576 596	100,00	865.49

Sumber Data : BPS Kabupaten Malang

[74] Pedoman Profil Kabupaten Malang (26 September 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Pembagian Wilayah Administratif

Secara rinci pembagian wilayah administratif pemerintah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Wilayah Administratif	Jumlah
Kecamatan	33
Kelurahan	12
Desa	378
Rukun Warga (RW)	3.155
Rukun Tetangga (RT)	14.696

Tabel 4.2 Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Malang

Sumber Data: BPS Kabupaten Malang

Adapun 33 kecamatan yang tergabung dalam Pemerintahan Kabupaten Malang selengkapnya adalah :

Tabel 4.3 Nama-Nama Kecamatan di Kabupeten Malang

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA KECAMATAN
1	AMPELGADING	17	NGANTANG
2	BANTUR	18	PAGAK
3	BULULAWANG	19	PAGELARAN
4	DAMPIT	20	PAKIS
5	DAU	21	PAKISAJI
6	DONOMULYO	22	PONCOKUSUMO
7	GEDANGAN	23	PUJON
8	GONDANGLEGI	24	SINGOSARI
9	JABUNG	25	SUMBERMANJUNG WETAN
10	KALIPARE	26	SUMBERPUCUNG
11	KARANGPLOSO	27	TAJINAN
12	KASEMBON	28	TIRTOYUDO

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

13	KEPANJEN	29	TUMPANG
14	KROMENGAN	30	TUREN
15	LAWANG	31	WAGIR
16	NGAJUM	32	WAJAK
		33	WONOSARI

Sumber Data : BPS Kabupaten Malang

B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional. Tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPD, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang beralamat di Jl. Panji No.119 Kepanjen Kabupaten Malang.

Berdasarkan Pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :[75]

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraandi kabupaten/kota berdassrkan ketentuan peraturan perundnag-undangan ;

[75]Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Membentuk PPK, PPS, KPPS, dalam wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan serta mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan pemilu dan / atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.[76]
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sartifikat rekapitulasi suara.
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Rekpaitulasi penghitungan suaradi PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sartifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota , dan KPU Provinsi;

[76] Saleh, dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

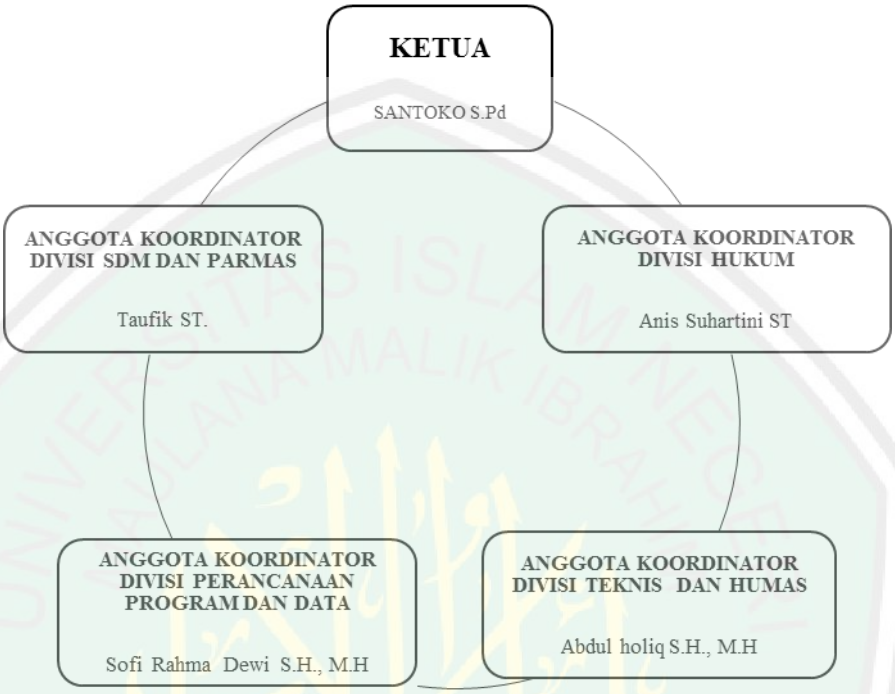
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota ;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota
13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten / kota. Dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukn tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/kota dan/ atau ketentuan perundang-undangan;
14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan /atau peraturan perundang-undangan.[77]

[77] Saleh,dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, 33.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Malang

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Malang

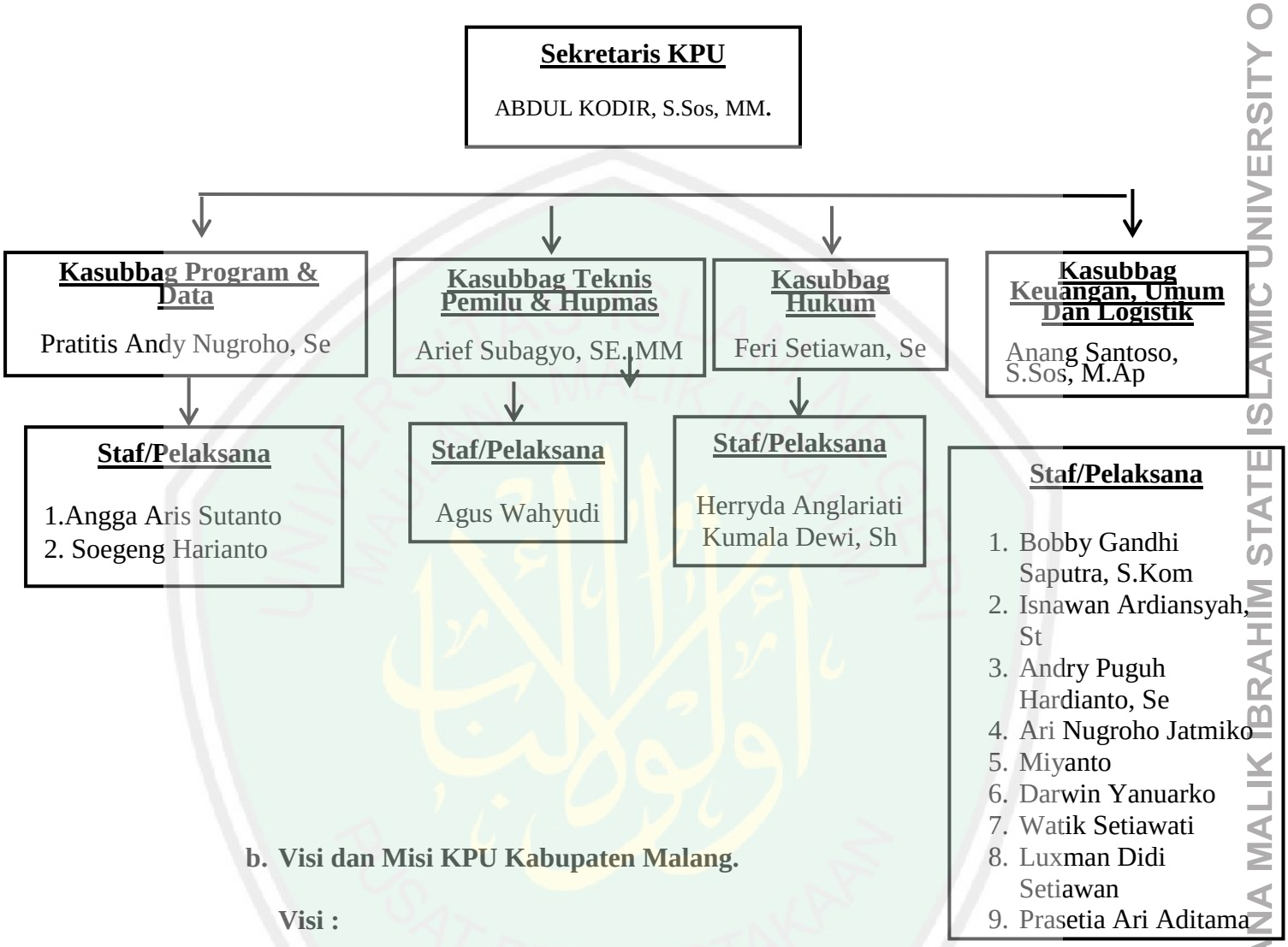


Menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Malang dibantu oleh Sekretarirat. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri atas Sub Bagian Program dan Data, Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, dan Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh beberapa staf. Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :[78]

[78] Profil KPU Kabupaten Malang, (Malang, 15 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 4.3 Bagan struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Malang



b. Visi dan Misi KPU Kabupaten Malang.

Visi :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan. [79]

[79] http://kpud-malangkab.go.id/# Profil KPU Kabupaten Malang (Malang, 15 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Misi:

1) Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetisi dan kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden Serta Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efesien, dan efektif.
4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum ecara adil dan setara serta, menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. [80]

C. Gambaran Umum Pemilih Kabupaten Malang dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018

Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Malang berdasarkan sartifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara KPU Kabupaten Malang, menunjukkan jumlah pemilih yang

[80] http://kpud-malangkab.go.id/# Profil KPU Kabupaten Malang (Malang, 15 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.958.327 pemilih dengan rincian yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.139.349 dengan prosentase sebesar 58,2% suara sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 818.978 suara dengan prosentase sebesar 41,8%. Pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2018 di Kabupaten Malang menunjukkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.966.373 pemilih dengan rincian yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.244.355 suara , sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 740.114 suara jadi prosentase yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 37%.[81]

Kedua rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur pada Tahun 2013 dan 2018 tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 26,1% Berikut ini tabel perbandingan perolehan suara KPU Kabupaten Malang antara tahun 2013 dan 2018 :

Tabel 4.4 Perbandingan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018

PEMILIHAN GUBERNUR		
TAHUN	**2013**	**2018**
1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1.958.327	1.966.373
2.Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih	1.139.349	1.244.35
3.Jumlah yang Tidak Menggunakan Hal Pilih	818.978	740.114
4.Prosentase yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	41,8 %	37%
5. Besar Penurunan	**26,1%**	

Sumber Data : Kantor KPU Kabupaten Malang

[81] Kantor KPU Kabupaten Malang Devisi Teknis dan Hupmas, (Malang,20 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka golput (golongan putih) pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur merupakan sebuah bentuk proses berdemokrasi masyarakat Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses saat pemilihan berlangsung. Harapan utama saat penyelenggaraan pemilu adalah agar terciptanya pemilihan yang aman, lancar, damai, adil, berintegritas serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang telah memberikan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018 yang diselenggarakan dapa tanggal 29 Agustus 2013 dan 27 Juni 2018.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dan 2018 merupakan suatu kebanggaan yang tidak bisa diukur serta prestasi dalam berdemokrasi bagi Indonesia khususnya Provinsi Jawa Timur, dalam menentukan pemimpin jawa Timur 5 tahun mendatang. Pandangan islam kepemimpinan bukan suatu yang istimewa, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas tetapi pengorbanan, juga bukan untuk berleha-leha tetapi kerja keras, bukan sewenang-wenang bertindak tetapi kewenangan melayani. Kepemimpinan adalah berbuat dan kepeloporan bertindak. Imam dan khalifah adalah dua istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk "pemimpin". Kata imam terambil dari kata *amma yaummu,* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata khalifah berakar kata *khalafa* yang pada mulanya berarti "di belakang" seringkali juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diartikan "pengganti" karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah digantiakannya.[82]

Al'Qur'an menggunakan kedua istilah ini, untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin, sekali didepan menjadi panutan. Para pakar menelusuri Al-Qur.an dan Hadis menetapkan empat sifat yang harus dipenuhi oleh para nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin umatnya, yaitu, (1) *Ash-Shidiq* yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. (2) A*l-Amanah* atau bisa diartikan kepercayaan, yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik dari tuhan maupun dari orang-orang yang dipimpin. (3) *Al-Fathonah*, yang berarti kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dua menanggulangi persoalan yang muncul seketika sekalipun. (4) *At-Tabligh* yaitu penyampaian yang jujur dan betanggung jawab atau dapat di istilahkan dengan "keterbukaan".[83]

Surat Al-Baqarah (2) ayat 124 tentang Kepemimpinan yaitu :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Dan Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman :"sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia ". Ibrahim berkata: (dan saya mohon juga) dari keturunanku: Allah berfirman: "janji-Ku ini tidak mengenai orang yang dzalim",[84]

[82]Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spritual,* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), 113.
[83]Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spritual,* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), 113.
[84]Al-Qur'an Surat Al-Baqarah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ada 2 (dua) hal yang menyangkut Surat Al-Baqarah (2) ayat 124 di atas *pertama,* kepemimpinan dalam pandangan Al-Qur'an bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah SAW atau dengan kata lain amanat dari Allah SAW. Karena itu pula, ketika sahabat nabi, Abu Dzarr meminta suatu jabatan, Nabi bersabda*: kamu lemah, dan inilah adalah amanah sekaligus dapat menjadi sebab kenistaan dan penyesalan di hari kemudian (bila disiasiakan). Kedua,* kepemimpinan menurut keadilan, karena keadilan adalah lawan penganiayaan yang dijadikan syarat oleh ayat diatas, dan keadilan tersebut harus dirasakan oleh semua pihak. Ayat lain yang membicarakan kepemimpinan yang baik. Lima sifat pokok yang hendaknya dimiliki pemimpin/imam. Kelima tersebut terungkap dalam dua ayat yaitu Surat As-Sajadah (32) ayat 24 :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْاۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami."[85]

Surat Al-Anbiya' (21) ayat 73 :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ

وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpinyang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada,

[85] Al-Qur'an Surah As-Sajadah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,"[86]

(1)Kesabaran dan ketabahan, Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin ketika mereka tabah/bersabar

(2)*Yahduna biamrina,* mengantar masyarakatnya ke tujuan yang sesuai dengan petunjuk kami (allah)

(3)*Wa auhaina ilaihim fi'lal khairat* (telah membudaya pada diri mereka kebajikan).

(4)*Abidin,* (beribadah, termasuk melaksanakan shalat dan menunaikan Zakat).

(5)*Yaqinun,* (penuh keyakinan). [87]

Pemilu merupakan bagian dari proses-proses politik yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam menyalurkan dukungannya masing-masing-masing. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 yang diikuti 4 (empat) kandidat yakni pasangan calon nomor urut 1 adalah Soekarwo dan Saifullah Yusuf, dan pasangan calon nomor urut 2 adalah Eggi Sudjana dan Muhammad Sihat, dan pasangan clon nomor urut 3 adalah Bambang Dwi Hartono dan Said Abdullah, dan pasangan calon nomor urut 4 adalah Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja. Pemilihan Gubernur Tahun 2018 diikuti 2 kandidat yaitu pasangan calon nomor urut 1 adalah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, dan pasangan calon nomor urut 2 adalah Saifullah Yusuf dan Puti Guntur. [88]

[86]Al-Qur'an Surah Al-Anbiya'.
[87]Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spritual, (*Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), 113.
[88] Laporan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 & 2018 Kabupaten Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur direncanakan dan diselenggarakan secara partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam prosesnya. Tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan, berikut ini Tahap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 2013 dan 2018. [89]

Tabel 4.5 Tahapan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018

PEMILIHAN GUBERNUR 2013	PEMILIHAN GUBERNUR 2018
Rekrutmen PPK, PPS, PPDP **25 Februari – 18 Mei 2013**	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon **1 - 7 Januari 2018**
Pemutakhiran Data Pemilih **2 April -10 Juni 2013**	Pendaftaran Pasangan Calon **8 - 10 Januari 2018**
Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) **11 Juni-1 Juli 2013**	Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU Untuk Memperoleh Tanggapan dan Masukan Masyarakat **10 - 16 Januari 2018**
Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) **8 Juli- 10 Juli 2013**	Pemeriksaan Kesehatan **8 - 15 Januari 2018**
Penyerahan Dukungan dan Calon Perseorangan **7 April- 11 April 2013**	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan **15 - 16 Januari 2018**
Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan **15 April- 12 Mei 2013**	Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon yang Diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik **8 - 10 Januari 2018**
Pendaftaran Bakal Calon Pasangan yang diajukan Partai Politik atau Golongan Partai Politik dan Perseorangan. **13 Mei – 19 Mei 2013**	Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang Diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik **10 - 16 Januari 2018**
Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan	Pemberitahuan Hasil Penelitian **17 - 18 Januari 2018**

[89] Kantor KPU Kabupaten Malang, (Jum'at, 20 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8 Juli - 14 Juli 2013	
Penetapan, Penentuan, Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon **15 Juli – 21 Juli 2013**	Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik **18 - 20 Januari 2018**
Kampanye **12 Agustus – 25 Agustus 2013**	Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU **20 - 26 Januari 2018**
Masa Tenang **26 Agustus – 28 Agustus 2013**	Penelitian Perbaikan Syarat Calon **19 - 27 Januari 2018**
Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS **29 Agustus 2013**	Penetapan Pasangan Calon **12 Februari 2018**
Rekapitulasi Hasil Pemungutansuara di PPS **30 Agustus – 31 Agustus 2013**	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon **13 Februari 2018**
Rekapitulasi Hasil Pemungutansuara di PPK **1 September – 2 September 2013**	Masa Kampanye **15 Februari 2018 - 23 Juni 2018**
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/ Kota **3 September- 4 September 2013**	Kampanye Melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik **10 Juni 2018 - 23 Juni 2018**
Rekapitulasi hasil Hasil Pemungutan Suara oleh KPU Provinsi dan Penetapan Pasangan Calon terpilih **5 September – 7 September 2013**	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga **24 Juni 2018 - 26 Juni 2018**
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah /Janji **12 Februari 2013**	Pemungutan Suara **27 Juni 2018.**

Sumber Data : KPU Kabupaten Malang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dengan tujuan agar memudahkan masyarakat mengetahui tahapan serta jadwal-jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut. Dasar hukum sosialisasi pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2013 adalah terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Dasar Hukum Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2018 ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adanya sosialisasi ini untuk mendorong agar masyarakat antusias melaksanakan pemilihan kepala daerah, mendorong masyarakat agar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan secara bebas dan bertanggung jawab, serta menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi.

Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018 banyak angka golput yang berada di Kabupaten Malang, disini KPU mempunyai strategi tersendiri untuk menerobos angka golput. Peneliti melakukan wawancara dengan penanggung jawab di antaranya yang telah dilakukan adalah membuat strategi dengan membagi beberapa segmen diantaranya adalah :

1) Segmen pemilih pemula.

> "*saya selaku penanggung jawab dalam segmen ini menegaskan bahwa banyak trobosan-trobosan yang dilakukan KPU Kabupaten Malang salah satunya dalam segmen ini adalah dengan cara memasuki sekolah sekolah dan universitas untuk mengajak siswa dan mahasiswa untuk belajar dasar-dasar kepemiluan terlebih dahulu dengan menanamkan jiwa kesadaran akan pentingnya dalam berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, serta dapat membuka wawasan mereka yang masih awam dengan pemilu. mengajari mereka untuk melindungi hak pilih karena dengan melindungi hak pilihnya mereka dapat memilih pemimpin menrut kriteria hati nuraninya masing-masing, kalau sejak dini tidak di tanamkan maka akan berdampak kedepannya mbak., pendidikan pemilih itu gak di gali di lingkungan sekolah saja tapi di gali di berbagi tempat dengan ikut organisasi komunitas atau lainnya. Dengan ini mereka akan tahu bagaimana cara memilih pemimpin dengan benar dengan cara berpartisipasi itu. Untuk dapat memahamkan para siswa siswi dan mahasiswa atau masyarakat umum lainnya dengan cara mengikut sertakan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau terjun langsung dalam pemilihan. Kalau belum terdaftar sebagai pemilih, mereka kita ajari untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dengan cara mendata mereka dengan menggunakan KTP/KK untuk memverivikasinya serta mendaftarkan mereka sebagai pemilih. Setelah mereka sudah terdaftar di dalam DPT mereka sudah di kategorikan mempunyai hak pilih tersendiri dan hak pilihnya itu yang harus di lindungi. Dalam sosialisasi segmen pemula ini saya dengan tim yang sudah di bagi bagi mendatangi beberapa sekolah dan universitas yang berada di Kabupaten Malang. Cara mendekati pada segmen pemula ini dengan cara membuat game-game tentang kepemiluan atau kuis-kuis, seminar atu dengan cara mengadakan workshop. Dalam segmen pemilih pemula ini saya berpatokan pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Pasal 198 Ayat (1) yang mengatakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih." [90]

Kesimpulannya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Pasal 198 Ayat (1) yang mengatakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.[91] Segmen pemilih pemula adalah golongan muda yang relatif awam dan minim terhadap politik yang pertama kalinya berpartisipasi dalam pemilihan umum dan mereka belum pernah mengikuti pemilihan sebelumnya. Materi yang di sajikan oleh KPU adalah lebih berorientasi membangun serta pemahaman, kesadaran kepada pemilih pemula tentang pentingnya pemuda dalam kegiatan demokrasi. Segmen pemula ini sangat penting karena jumlah pemilih pemula sangat banyak yang tersebar mulai dari pelosok desa hingga ke Kabupaten Malang. Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum

[90]Luxman Didi Setiawan, Staf Pelaksana KPU Kabupaten Malang Divisi Teknis dan Hupmas, Wawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang, 17 September 2019).
[91]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kabupaten Malang dalam segmen pemula adalah dengan mendatangi sekolah menengah ke atas hingga ke perguruan tinggi dan masyarakat umum yang memasuki umur 17 tahun dengan metode tatap muka. Penyampaiannya, KPU Kabupaten Malang menggunakan alat peraga seperti pamflet untuk mengenalkan siapa yang menjadi peserta pemilu dan tata cara memilih yang baik dan benar, disamping itu bisa menggunakan simulasi atau permainan tentang kepemiluan dengan rincian simulasi melakukan tata cara memilih dan tata cara pencoblosan. Melakukan dialog atau Tanya jawab juga bisa digunakan sehingga cara ini memudahkan anak-anak memahami. Pendidikan pemilih adalah salah satu cara bagi segmen pemula dan masyarakat umum, bukan hanya segmen pemula yang melakukan pendidikan pemilih tapi seluruh masyarakat juga bisa mengikuti pendidikan pemilih dalam rangka menggali lebih dalam lagi informasi kepemiluan. Pola sosialisasi tersebut diatas peserta tidak mudah jenuh dalam pembelajaran dan dengan mudah peserta memahami serta mempraktekkan dalam kepemiluan.

2) Segmen Masyarakat Nelayan

> "*menurut saya dalam segmen nelayan ini pada saat melakukan sosialisasi saya mendatangi berbagai tempat yang daerahnya dekat dengan pesisir pantai. Untuk memudahkan saya dalam mengajak sosialisasi ini KPU KAbupaten Malang bekerja sama dengan PPK mengundang segenap para komunitas nelayan dengan mengumpulkan mereka di tempat yang sekiranya nyaman untuk melakukan sosialisasi.dalam sosialisasi ini yang saya sampaikan adalah dimulai dari tentang tata cara pendaftaran sebagai pemilih bagi orang yang belum terdaftar dan belum menggunakan hak pilih, memberi wawasan serta menanamkan kesadaran berpolitik agar kehidupan selanjutnya lebih terjamindan, dengan mereka ikut serta yo aspirasinya dapat tersalurkan dengan baik agar keluh kesah masyaraka kepada pemeintah itu dapat di tindak lanjuti. Lah kenapa kita memilih sosialisasi di pesiir pantai soalnya orang yang tinggal di pesisir pantai itu sulit menjangkau informasi, dikarenakan faktor jaringan dan faktor*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transportasine mbak, apalagi daerah kabupaten Malang bagian selatan pucuk ini hampir jauh dari pusat pemerintahan dan juga sulit di jangkau ibarat kata iki : omah plosok sing angel jaringan lan ganok listrik". La wong lisrik lan banyu ae gae energy buatan mbak opo maneh kate mbangun tower sing sak munu duwe"kalua masalah penekanan menghindari golput yaaa tau sendiri mbak orang daerah terpencil ini jarang yang peduli dengan hal politik, mereka lebih mengutamakan golek rezeki alias golek duwek untuk makan sehari hari. "[92]

Kesimpulannya adalah sosialisasi dalam bentuk Segmen masyarakat nelayan adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan yang mayoritas masyarakat nelayan ini bertempat tinggal di pelosok desa yang jauh dari pusat pemerintahan serta minimnya informasi karena kendala jaringan yang jarang sekdali tersambung sampai sekitaran tempat tinggalnya. Keseharian mereka yang berada dilaut, akses untuk memining kepemiluan sangat terbatas. KPU Kabupaten Malang memudahkan akses sosialisasi dengan datang ke sekitaran tempat tinggal untuk melakukan sosialisasi tatap muka dengan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Desa (PPS) untuk mengundang komunitas nelayan agar mendatangkan masyarakat nelayan untuk mengikuti sosialisasi. Penyampaiannya KPU Kabupaten Malang menggunakan cara menyebarkan brosur, Pamflet, poster yang berisikan tentang pengenalan calon peserta yang mengikuti pemilu guna untuk mengimbau kepada masyarakat dalam berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya. Penyampaian dalam kepemiluan juga di sertakan tahapan, jadwal, program pemilihan serta memberikan pemahaman kepada mereka tentang tata cara mencoblos yang

[92]Angga Aris Sutanto, Staf Pelaksana KPU Kabupaten Malang Divisi Umum Wawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang, 17 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik dan benar agar pada saat pencoblosan aspirasi masyarakat dapat secara sah masuk dalam perhitungan suara calon mereka yang terpilih. KPU melakukan simulasi tentang pencoblosan yang baik dan benar agar mencegah terjadinya kesalahan pada saat pencoblosan yang akan mengakibatkan surat suara tidak sah. Pelaksanaan sosialisasi yang didatangi oleh KPU Kabupaten Malang lebih tepatnya di daerah permukiman nelayan yang berada di desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

3) Segmen pedagang pasar

> *"pada saat melakukan sosialisasi pasar ini mbak mudah mudah sulit untuk mengarahkan pembicaraan, ya kita namae orang pasar ini lebih banyak clometanmbak.,. heheh jadi gimana caranya kita harus bisa merakyat mau gak mau ya kita jadi orang embonganmbak ya sesekali ini mbahase diluar konteks buat guyonan dikit-dikit agar mereka dapat menerima apa yang kita sampaiakn mbak, dan terkadang kita mengikuti cara Bahasa mereka ya meskipun kadang arahnya kita kata-kata yang sedikit fulgar untuk bisa mengenalkan mereka tentang pentingnya untuk menjadi pemilih yang baik dan benar. Dengn cara mengikuti Bahasa dan cara mereka berbicara kita bisa dengan mudah menyampaikan materi menurut sepemahaman mereka, kita dapat mengajari mereka tentang tata cara pencoblosan dengan baik agar mereka puas dan lega dengan pemimpin yang mereka pilih dan pemimpin yang mereka pilih bisa masuk dalam suara yang sah, untuk orang yang belum mempunyai hak untuk memilih kita mengarahkan mereka untuk mendaftarkan diri menjadi pemilih. Memberi wawasan serta pengetahuan yang luas dan mendalam dengan penyampaian sesuai dengan katrakter mereka, itu salah satu strategi kami untuk memudahkan merangkul mereka untuk menggunakan hak pilihnya dan melindungi hak pilihnya, dalam melindungi hak pilih itu juga penting mbak,[93] kan sudah ada ketentuan undang undangnya seprti pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) yang berbunyi: "(1) setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, (2) setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dana atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kebutuhan. Bangsa."[94]*

[93]Darwin Yanuarko, Staf Pelaksana KPU Kabupaten Malang Divisi Umum, Wawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang 17 September 2019).

[94] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Segmen pedagang pasar adalah masyarakat yang berprofesi menjadi pedagang di pasar. Biasanya pedagang pasar tersebut jumlahnya begitu banyak sehingga informasi kepemiluan bisa tersampaikan secara luas, atau mungkin bisa melakukan sosialisasi dengan cara melakukan transaksi penjualan sambil menyampaiakan pengetahuan tentang kepemiluan. Peristiwa sangatlah mudah bagi masyarakat menangkap pengetahuan di iringi menjalankan aktivitasnya berbelanja dan berjualan serta bersosialisasi. KPU Kabupaten Malang melakukan sosialisasi dengan cara simulasi di tengah tengah kegiatan pedagang di pasar dengan cara mendatangi perkomplek bedak agar memudahkan serta memahamkan akses sosialisasi simulasi tata cara pencoblosan sehingga mereka benar-benar paham tata cara pencoblosan yang benar, mudahnya para pedagang serta pembeli mengungkapkan aspirasinya lewat pemilihan dengan sistem pencoblosan agar dapat di hitung secara sah. Pelaksanaan sosialisasi segmen pedagang KPU Kabupaten Malang mendatangi serta melakukan sosialisasi yang bertempat di pasar Lawang yang berada di Kecamatan Lawang. Pasar ini selalu di kunjungi banyak orang karena pasar ini buka 24 jam dan pasar Lawang ini tidak ada hentinya pengunjung berdatangan.

4) Segmen budaya

> *"jujur saja mbak segmen budaya ini adalah segmen dimana kita harus memasuki budaya-budaya yang di gemari oleh masyarakat Kabupaten Malang, di antaranya yang lagi trending saat ini adalah budaya jaranan, caplokan, bantengan dan budaya linnya, untuk mengajak mereka serta memberikan wawasan dalam pendidikan pemilih kita mengadakan even atau kegatan dimana kegiatan ini dilaksanankan yang banyak peminatnya agar dapat menarik masyaraat untuk melihat serta di situ kita masuk*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *untuk mensosialisasikan kepada mereka tentang tahapan, jadwal dan tata cara dalam pilkada ini. Unt penyampaian materiya pun di sela sela acara berlangsung agar masyarakatnya mendengar dan mengetahui sedikit demi sedikit. Kalua kita melakukan sosialisasi di sela sela acara kan enak, banyak masyarakat yang masih mendengar aliag gak semburat deisek..,,* ’’[95]

Segmen budaya adalah segmen yang dimana KPU Kabupaten Malang mengangkat budaya dari daerah itu sendiri, dalam segmen ini KPU Kabupaten Malang melakukan sosialisasi di Gubuk Klakah Kecamatan Poncokusumo yang notabennya mereka sangat erat akan kebudayaannya, KPU Kabupaten Malang bekerja sama serta menggandeng kesenian-kesenian yang berada di Kabupaten Malang dengan cara melakukakan sosialisasi melalui media tontonan kesenian yang di antaranya adalah kesenian Kuda Lumping, Kesenian Bantengan, Kesenian Reog dan lain sebagainya. Kesenian tersebut dapat menarik perhatian masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi serta mendapatkan informasi tentang kepemiluan serta tata cara pencoblosan. Penyampaian materi sosialisasi dimuat tahapan serta jadwal-jadwal kepemiluan dengan cara menggunakan alat peraga yang berupa brosur, pamflet, serta baliho yang di tempelkan sepanjang jalan atau sepanjang arah tempat dimana kesenian itu di tayangkan. Alat peraga ini digunakan sebagai pengenalan calon peserta pemilu agar masyarakat mengetahui dan mengenalnya sehingga masyarakat bisa tahu siapa yang akan di pilih sebagai pemimpin yang diharapkannya. Masyarakat bisa memahami pentingnya dalam

[95]Andri Puguh Heriyant,o,Staf Pelaksana KPU Kabupaten Malang Divisi Program dan Data, Wawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang 19 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berpartisipasi dalam kepemiluan dan dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak sampai terjadi adanya golput (golongan putih).

5) Segmen komunitas

> *"segmen komunitas ini tegolong segmen yang lebih seru mbak menurut saya, karena segmen ini menyatukan banyak komunitas-komunitas lainnya yang berbeda latar belakangnya mulai dai segi soasial, atau sampek segi yingkat ke emosionalnyacontohnya seperti, merangkul dari yang paling baruyaitu komunitas minatur truk sepeda onthel, dalan paling seru lagi ini dalam komunitas marjinal yang seperti anak punk, anak jalanan, pengamen, pemulung, para bencong-bencong mania dan juga komunitas komunitas lainnya. Disini kita dapat merangkul segala aspek masyarakat melalui berbagai komuntas-komunitas untuk mengnealkan pemilu itu seperti apa sih?, tata cara untuk memilih atau mencoblos bagaimana agar surat suara saya ini sah, serta pentingnya dalam melindungi hak pilih itu apa bagi kehidupan mereka selanjutnya., seberapa pengaruhnya hak suara kita itu giamana atau timbal balik kalua mencoblos itu apa dari sini kan masyarakat sedikit demi sedikit akan tau seberapa pengaruhnya hak suara mereka bagi pemerintahan dan kehiduannya. Dengan ini secara sepontan pencoblosan kan jadi salah satu trending topik dan menarik tapi kita ya professional saja terhadap kerja kita. Biar mereka tau seberapa pentingnya partisipasinya itu ".* [96]

Segmen komunitas adalah segmen dimana beberapa komunitas di wilayah Kabupaten Malang di kumpulkan menjadi satu yang sudah bekerja sama dengan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) daerah terkait yang berada di Kabupaten Malang untuk merangkul mereka atau mengajak mereka berpartisipasi dalam pemilu dengan gerakan sadar pemilu dengan ini para komunitas bisa bebas menggunakan hak pilihnya setelah mendapat pencerahan serta pengarahan oleh KPU Kabupaten Malang, jika dilihat komunitas-komunitas yang berada di wilayah Kabupaten Malang ini cukup banyak dan meluas, di antaranya adalah komunitas sepeda ontel, komunitas hijaber,

[96]Ari Nugroho Jatmiko, Staf Pelaksana KPU Kabupaten Malang Divisi UWawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang 19 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

komunitas sepeda dan mobil trail, komunitas nelayan, kamunitas disabilitas, komunitas nelayan, komunitas petani, komunitas pencak silat, IWAMA (Ikatan Waria Malang), komunitas kicau mania, WTS (wanita tuna susila). Penyajian materi kepemiluan, KPU Kabupaten Malang menggunakan metode tatap muka dengan pola interaksi secara langsung oleh audience dengan cara mengadakan kegiatan sesuai segmen yang dituju.

6) Segmen Kaum Marjinal

> *"kaum marjinal ini mbak kaum yang berada di bawah, artinya mereka ini biasanya sangat awam sekali pengetahuannya lah ini berarti tugas kita mengenalkan atau memberi dasar dasar kepemiluan itu bagaimana, dan juga sedikit demi sedikit menanamkan jiwa kesadaran mereka dalm terjun langsung sebagai pemilih, kalupun mereka belum terdaftar ya kita ajari untuk mendaftarkan terlebih dahulu, biasanya kana da yang masyarakat yang kurang di perhatikan sehingga mereka tidak tidak mempunyai KTP dan mereka tidak terdaftar di DPT, dan merak mereka tersebut biasanya orang yang sudah di terlantarkan atau kabur dari rumah atau karena faktor lainnya, la ini kita pandu untuk membuat ktp terdahulu trus kita setelah ada KTP tersebut kita daftarkan sebagai pemilih agar nama mereka tercantum di DPT , karena kasihan mereka-mereka biasanya ingin merubah nasibnya melalui mendengarkan keluh kesahnya agar bisa tersalurkan ke pemerintah dan pemerintah dapat membantu mereka yang mungkin sekolahnya tidak mampu atau dari segi kehidupan tidak mampu ini dapat membantu mereka. Siapa tau keluh kesah kita dapat di dengar oleh pemerintah sehingga kita dapat merubah nsib kita dengan baik. Lah kaum marjinal ini biasanya seperti anak anak punk, bencong, psk, anak jalanan yang terlantar, pengemis pengemis jalanan dan lain sebagainya, kita rangkul mereka kita buka wawasan mereka, kita tanamkan jiwa niwa nasionalismenya agar kehidupan nantintya bisa menjadi lebih baik lagi.* [97]

Segmen kaum marjinal adalah segmen yang didalmanya terdapat anak-anak punk, WTS (wanita tuna susila), IWAMA (ikatan waria malang), dan kaum marjinal lainnya. Kaum marginal ini biasa di sebut dengan masyarakat

[97]Miyanto, Staf Pelaksana KPU Kabupaten Malang Wawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang 27 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pinggiran atau kelompok prasejahtera. KPU K abupaten Malang melakukan sosialisasi serta pendidikan pemilih menggunakan pendekatan secara langsung secara tatap muka dengan cara mendatangi setiap kaum marjinal melalui interaksi kegiatan mereka dimulai dari pihak KPU tururn ke jalan hingga memasuki ke daerah tempat tinggal.

Kaum marjinal ini terdiri dari para penjajah malam, anak jalanan, anak punk, pemulung untuk selanjutnya di undang pada forum yang di dalamnya mereka akan di berikan wawasan yang menekankan tentang penting nya memilih. Mereka akan di beri pengetahuan tentang tata cara memilih, tata cara pencoblosan serta jadwal dan tahapan pemilu yanga akan di selenggarakan. Segmen ini kebanyakan orang yang masih awam tentang kepemiluan, karena kurangnya jaringan serta informasi yang menangkap sehingga mereka masih tergolong awam tentang adanya pengetahuan pemilu, sehingga kaum marjinal ini perlu di khususkan dalam pengetahuannya. Metode yang digunakan untuk menerobos ilmu pengetahuan tentang pemilu ini dengan melakukan tatap muka secara langsung dengan pola Tanya jawab, simulasi dengan memberikan wadah, mengenalkan calon peserta yang akan maju dalam pemilu agar mereka tahu siapa yang akan dipilihnya menjdai pemimpin, pentingnya dalam berpartisipasi dan mereka dapat menyalurkan aspirasinya lewat pencoblosan. Sosialisasi segmen kaum marjinal KPU Kabupaten Malang datang ke-beberapa tempat yang di antaranya seperti kolong jembatan yang banyak terdapat anak-anak punk serta anak jalanan dan pemulung, dan juga mendatangi tempat-tempat bescamp.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7) Segmen keagamaan

> *"menurut saya segmen keagamaan ini adalah segmen yang berbanding terbalik, di sini kita merangkul para tokoh tokoh agama, di mulai dari ustadz di kampung-kampung sampai ke ulama pesantren, lah akhirnya kita mengambil jalan tengah dengan menghadiri sosialisasi ke yayasan panti asuhan anak yatim yang berbasic islam di sisi lain dan juga mendatangi gereja. Lah ini saya dengan team saya memasuki salah satunya organisasi-organisasi, fatayat fatayat NU dan lain sebagainya. "*[98]

Segmen keagamaan adalah segmen yang di dalamnya di isi oleh para pemuka agama di wilayah Kabupaten Malang, metode pendektannya pada segmen ini di lakukan melalui para tokoh agama atau pengurus majelsi taklim, marbot, remaja masjid atau yang lainnya. KPU Kabupaten Malang melakukan sosialisasi pada segmen keagaam ini dengan bekerja sama oleh para tokoh pemuka agama baik dari agama Kristen, islam, hindu, budha dan lain sebagainya. Materi yang di sampaikan adaalah tentang tahapan, jadwal serta simulasi tentang cara pencoblosan dan tata cara pemilihan yang baik dan benar. Sasaran yang di tuju dalam segmen keagamaan ini dantaranya adalah, pengajian, organisasi islam, perkumpulan ibu-ibu fatayat NU, perkumpulan Banser, umat gereja yang sedang melaksanakan ibadah di gerja, dan umat agama yang lainnya yang sedang menjalankan aktivitasnya di tempat tersebut. Sasaran ini sangat tepat untuk dilakukannya sosialisasi karena setiap momen keagamaan mereka selalu bertemu sehingga informasi yang disampaikan oleh KPU tentang kepemiluan bisa tersebar luas kepada masyarakat umum, masyarakat agama lebih mudah untuk mengajak sahabat dan keluarganya memberikan hak suara nya dan bisa menyampaikan aspirasinya secara bebas

[98]Prasetya, Staf Pelaksana KPU Kabupaten Malang, Wawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang 19 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan melalui sistem pencoblosan. Metode sosialisasi yang digunakan dalam segmen keagamaan ini dengan menggunakan metode tatap muka dalam setiap kegiatan keagamaannya dengan pola seperti dialog, Tanya jawab, serta pembagian alat peraga seperti brosur pamflet dan lain sebagainya. Melakukan pola ini dapat membangun hubungan antara masyarakat dengan KPU selaku penyelenggara pemilu sehingga terbangunnya sinergitas dalam mendukung tingkat partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu.

8) Segmen perempuan

> *"salah satu strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Malang adalah dengan melakukan segmen perempuan yang biasanya dalam segmen ini dapat merangkul para ibu ibu PKK, ibu-ibu Fatayat , jamaah tahlil dan lainnya, bisa jadi kita mengundang para komunitas hijaber, Karena d Wilayah Kabupaten Malang ini ternyata ada komunitas hijaber yang masih belum begitu terkenal di beberapa daerah, tetapi memang benar adanya gitu loh mbak, dari sini kan kita bisa merangkul komunitas tersebut agar mereka menyebarluaskan sosialisasi yang mereka terima ke teman temannya, jadi kan pengetahuan ini dapat tersebar luas, untuk materinya saya kira sama dengan segmen segmen lainnya bedanya Cuma cara masuk di dalam segmen tersebut sih mbakk.,"*[99]

Segmen perempuan adalah dimana segmen ini berisikan para kaum perempuan yang dilihat dari kuantitasnya kaum perempuan adalah lebih banyak dari kaum laki-laki dan juga perempuan mempunyai komunikasi yang intens terhadap keluarga di lingkungan sosial masyarakat sehingga harapannya adalah informasi atau pengetahuan tentang kepemiluan ini dapat tersebar dengan cepat di masyarakat. Sasaran yang dituju adalah kepada ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu jamaah tahlil, ibu-ibu fatayat

[99]Anis Suhartini, Ketua KPU Kabupaten Malang Wawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang 19 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

muslimat NU serta perkumpulan lainnya. Metode yang digunakan dalam sosialisasi kaum perempuan ini adalah dengan metode tatap muka secara langsung dengan memasuki kegiatan yang sedang berlangsung. Penyampaian materinya dengan menggunakan alat peraga atau brosur yang berisikan tentang pengenalan calon peserta pemilu dan juga tahapan, jadwal, serta tata cara memilih dan tata cara pencoblosan. Kaum perempuan akan paham bagaimana melindungi hak pilihnya dengan baik seperti yang sudahter cantum dalam Undang-Undang, serta dapat menyalurkan aspirasinya dengan bebas yang melalui sistem pencoblosan.

9) Segmen media sosial

Segmen media sosial adalah segmen yang menggunakan teknologi informasi lewat sosial media yang setiap tahunnya di perbarui dalam perkembangan zaman saat ini, berbeda dengan perkembangan sebelumnya yang media sosialnya hanya terbatas. Teknologi informasi pada zaman sekarang selalu di perbarui dalam setiap masanya sehingga masyarakat sangat antusias dan berambisi untuk menggunakan gadget Akses sosialisasi bertambah luas hingga ke penjuru. Mayoritas masyarakat sudah menggunakan gadget dan tidak sulit baginya untuk meng-update pengetahuan tentang kepemiluan kecuali masyarakat yang bertempat tinggal di pelosok desa yang sulit untuk mendapatkan jaringan dan jauh dari pusat pemerintaha. Metode yang di gunakan dalam segmen media sosial ini berbasis gadget, radio, majalah, tabloid, koran serta media-media lainnya. Pengguna sosial media bisa mendapatkan informasi lewat gadget yang mereka punya. Penyampaian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

materinya, KPU Kabupaten Malang bekerja sama dengan perusahaan media cetak seprti tabloid, koran, majalah untuk menerbitkan pengetahuan atau informasi tahapan, jadwal serta memberi gambar simulasi tata cara memilih dan tata cara pencoblosan, dan juga melakukan kerja sama dengan perusahaan chanel radio di berbagai macam di wilalah Kabupaten Malang untuk melakukan siaran langsung dengan memberikan informasi kepemiluan melalui siaran radio. Adanya siaran radio masyarakat dari berbagai macam kalanganpun dapat mengaksesserta mendengarkan informasi tersebut, banyak masyarakat yang dapat menerima informasi secara luas.[100]

10) Segmen Masyarakat umum

> *"menurut saya sosialisasi dengan masyarakat umum ini yang utama karena dari semua komunitas kami mengundang dalam bentuk gerak jalan sehat dan itu kami mengundang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang untuk ikut serta memeriahkan gerak jalan ini. Lah ini kan otomatis di ikuti dari berbagai kalangan mulai dari yang kecil sampai pemuda sampai orang dewasa hingga lansia lah berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini di sela sela kegiatan ada pendidikan pemilih serta membuka pengetahuannya secara luas dan memberi contoh atau simulasi tentang tata cara pencoblosan dengan baik, agar masyarakat nantinya itu dapat tersalurkan surat suara yang sahnya. Sehingga tidak sia sia mereka untuk mencoblos pemimpin yang mereka pilih. Di satu sisi kami juga di bantu oleh rekan rekan PPK dan PPS untuk mensukseskan acara ini yang di dalamnya mengandung unsur sosialisasi pendidikan pemilih.dengan mengadakan iven ini kan kita bisa membangun jaringan silaturahmi kepada masyarakat Kabupaten Malang,* [101]

Segmen masyarakat umum adalah segmen yang meyeleluruh, artinya, sosialisasi ini untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan segmen atau yang lainnya. Pelaksanaan sosialisasi segmen masyarakat umum, KPU membuat acara jalan sehat dengan hadiah yang sangat menaraik perhatian,

[100]Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Malang, (Malang 25 September 2019).
[101]Luxman Didi Setiawan, (17 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat antusias untuk mengikuti acara jalan sehat demi mendapatkan hadiah dan juga mendapatkan pengetahuan serta informasi tahapan, jadwal dan tata cara pemilihan dan tata cara pencoblosan.

Metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang adalah dengan metode tatap muka secara langsung, dan juga menggunakan alat peraga pamflet serta brosur untuk mengenalkan siapa calon peserta yang akan maju dalam pemilu yang akan datang. Pengenalan tersebut masyarakat dapat mengenal siap saja orang yang mencalonkan dan sudah mulai bis ber angan angan siapa yang akan di pilih menjadi pemimpin menurut hati nurani mereka tanpa terprovokasi oleh siapapun.

11) Segmen Disabilitas

> "*disabilitas ini tak jauh beda dengan segmen marjinal, di semen ini para disabilitas lebih antusias dalam pemilukada ini, para penyandang disabilitas lebih di utamakan, jadi kami para team dengan penyandan disabilitas memiliki hubungan yang erat dan bahkan lama para disabilitas atau komunitasnya untuk bergabung mensosialisasikan pemilihan kepala daerah ini. Mereka berbondong-bondong mengikuti setiap kegiatan "kami perwakilan dari penyandang disabilitas merasa dan di hargai bahkan hampir selayaknya keluarga, kita para team yang terjun ke lapangan juga bekerja sama dengan pembina atau ketua komunitas penyandang disabilitas untuk menjadi tangan kanan kita. Sangat tidak mungkin jikalau kita itu turun sndiri mbak. Soalnya kita juga tidak banyak mengetahui Bahasa isyarat mereka jadi kita menggunkan pihak ketiga. Dalam metode penyampaiannya juga kita sedikit banyak menuntuk mereka pelan pelan samapi mereka paham, dan juga kita mengadakan simulasi atau percobaan dalam tata cara pencoblosan. Pra penyandang disabilitas ini boleh dikatakan lebih di istimewakan karena dengan keterbatasan mereka juga jadi masyarakat umum tidak boleh saling iri dengan mereka karena masyarakat umum juga harus bisa memahami dengan segala kekurangan mereka.* [102]

[102]Mahardika Narendra, Wawancara Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Divisi Humas Dan Parmas, (Malang, 19 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 5 menjelaskan bahwasannya : [103]

> *"penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai Calon Presiden /Wakil Presiden sebagai calon Anggota DPRD dan sebagai penyelenggara "*

Pemilih penyandang di sabilitas ini lebih di utamakan dan di istimewakan dengan keterbatasan mereka agar mereka juga bisa menjadi pemilih yang baik dengan ketersediaan tempat pencoblosan yang mudah di jangkau sebagai mana di di atur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 35 yakni :

> *"TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah di jangkau. Termaduk oleh penyandang disabilitas tidak menggabungkan di desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya langsung bebas, rahasia"*[104]

Pemilu Segmen disabilitas ini adalah segmen dimanan mereka adalah masyarakat yang berkebutuan khusus, untuk melakukan sosialisasi KPU Kabupaten Malang bekerja sama dengan lembaga yang menangani orang yang berkebutuan khusus atau dengan komunitas-komunitas penyandang disabilitas. Metode yang di gunakan dalam melakukan sosialisasi adalah dengan metode tatap muka secara langsung dengan pemahaman yang sesuai dengan keterbatasan mereka. KPU juga memberikan motifasi serta dukungan kepada

[103]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
[104]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dengan memberikan perlakuan yang khusus kepada mereka.

Kalangan penyandang disabilitas dalam pemilu sasarannya adalah semua masyarakat penyandang disabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Sosialisasi ini sangat penting karena kuantitas penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Malang ini sangat banyak. Tata cara pencoblosan dan tata cara pemilihan ini juga di sosialisasikan sesuai dengan keterbatasan mereka guna untuk menerima informasi secara baik dan benar agar mereka tidak salah tangkap tentang informasi kempemiluan.

Strategi yang sudah digambarkan di atas KPU berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelengggara Pemilihan Umum dengan sasaran :

1. Pemilih berbasis :
    a. Keluarga
    b. Pemilih Pemula
    c. Pemilih Muda
    d. Pemilih Perempuan
    e. Pemilih Penyandang disabilitas
    f. Pemilih berkebutuan khusus
    g. Kaum Marjinal
    h. Komunitas
    i. Keagamaan
    j. Relawan demokrasi
    k. Warga internet
2. Masyarakat umum
3. Media massaa
4. Partai politik peserta pemilu
5. Pengawas
6. Pemantau pemilu dalam negeri dan pemantau oemilu luar negeri
7. Organisasi kemasyarakatan.
8. Masyarakat adat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Instansi pemerintah. [105]

Memasuki sasaran diatas memudahkan KPU Kabupaten Malang membangun jaringan-jaringan komunikasi atau sosialisasi serta memberikan metode untuk menyampaiakan materi materi yang sesuai dengan sasaran yang akan di tuju. Materi yang di sampaikannya secara global mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts.KPU-Prov-014/2013 Nomor. 2 Poin a-g Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor.9/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 Huruf B Angka 1-9 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. isi dari Materi Sosialisasi Pemilihanan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan 2018 adalah sama yang diantaranya adalah :

1. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
   a. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
   b. pencalonan dalam Pemilihan;
   c. kampanye dalam Pemilihan;
   d. dana kampanye peserta Pemilihan;
   e. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan
   f. suara Pemilihan; danpenetapan Pasangan Calon terpilih dalam
   g. Pemilihan
2. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
3. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
   a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;

[105]PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar
c. Pemilih;
d. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran
e. data; dan
f. penyusunan daftar Pemilih.

4. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1huruf b, meliputi:
   a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
   b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
   c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
   d. penetapan Pasangan Calon; dan
   e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 1 huruf c, meliputi:
   a. ketentuan Kampanye;
   b. jadwal Kampanye; dan
   c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
6. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, meliputi:
   a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
   b. jenis laporan dana kampanye;
   c. penyusunan laporan dana kampanye; dan
   d. audit dan hasil audit dana kampanye.
7. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e, meliputi:
   a. tata cara pemungutan suara;
   b. tata cara penghitungan suara;
   c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
   d. pengumuman hasil Pemilihan.
8. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota menyampaikan materi Sosialiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 kepada Pemilih.
9. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, memuatinformasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.[106]

Strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang melalui trobosan-trobosan dalam penekanan angka golput (Golongan putih) kurang lebih masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya partisipasi, tetapi kurang lebih

[106]Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts.KPU-Prov-014/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor.9/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga masih banyak masyarakat yang kurang tanggap dengan masalah kepemiluan.

> "*pemilihan itu ada 2 yaitu pemilihan hanya sekedar mobilisasi atau ikut orang-orang sekitar dengan dan pemilihan yang sudah tertanam dari diri mereka"*[107]

Menurut Bapak Mahardika Narendra selaku komisioner dan bapak Arief Subagyo selaku Divisi teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Malang mengatakan bahwasannya pemilih ini ada 2 (dua) diantaranya adalah pemilih yang hanya sekedar mobilisasi atau masyarakat yang terpengaruh oleh lingkungan sekitar atau juga pemilih yang sudah tertanam prinsip tidak golput atau melindungi hak pilihnya dengan berpartisipasi yang berdasarkan logika masyarakat itu sendiri. Pendidikan pemilu ini tidak hanya berada di KPU saja tetapi pendidikan pemilu itu berada di berbagai lini baik sekolah, universitas atau dunia pekerjaan. KPU memberikan pendidikan pemilih hanya sebatas pemilu yang akan berlangsung itu saja atau tidak berkelanjutan karena pada dasarnya KPU hanya berkedudukan sebagai penyelenggara saja, untuk melakukan pendidikan berkesinambungan ini adalah tugas sebagian dari Pemerintah Daerah. Beberapa segmen, KPU mempunyai cara / metode tersendiri dalam memasuki segmen untuk bersosialisasi, serta materi yang disampaikan juga sesuai dengan segmen yang akan di tuju. [108]

Sosialisasi Pemilihan Gubernur Tahun 2013 KPU berpedoman pada aturan PKPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

[107]Bapak Mahardika Narendra Wawancara Komisioner KPU Kabupaten Malang, Arief Subagyo selaku Divisi Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Malang, (Malang 19 September 2019).
[108]Mahardika Narendra, Arief Subagyo (Malang 5 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berisikan tentang prinsip dan tujuan untuk berpartisipasi dan hak kewajiban bagi pemilih dengan metode yang di gunakan oleh KPU Kabupaten Malang sebagai pandangannya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts KPU-Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Metode serta strategi KPU dalam menekan angka Golput di gunakan pada pemilihan Gubernur Tahun 2013 adalah sebagaimana dimaksud dalam KKPU ini terdapat pada poin ke XI yang berisikan :

a) Pembentukan pokja pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur
b) Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk *Public Information Center, Call Center, Website, serta Media Center.,*
c) Membangun Infrastruktur produksi materi sosialisasi pemilu KEpala Daerah dan Wakil KEpala Daerah Provinsi Jawa Timur
d) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audio visual dan digital
e) Menentukan materi sosialisasi yang akan di produksi oleh KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
f) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan
g) Menentukan dan melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur
h) Melakukan koordinasi secara teru menerus dengan KPU bagi KPU Provinsi dan KPU Provinsi bagi KPU KAbupaten/ Kota serta stakeholder pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2013 bersifat terpadu, sistematis dan komprehensif. Strategi di atas KPU Kabupaten Malang ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kurang efektif menjalankan semua strategi terutama di bidang sosialisasi, masyarakat berkemungkinan kecil untuk bisa ikut serta dalam pemilu. dilihat dari masyarakat Kabupaten Malang, banyak mereka yang masih awam tentang pemilu, perlu diadakannya sosialisasi yang intensif atau membuat acara serta didalamnya ada unsur sosialisasi. Pendekatannya juga masih minim tidak menyeluruh, dan juga masyarakat lebih banyak mengeluarkan kepentingannya di pekerjaannya dari pada ikut serta dalam Pemilukada Tahun 2013. Angka kematian yang signifikan dalam artian banyak masyarakat yang tidak melaporkan sanak saudara yang meninggal dunia ke Dispendukcapil sehingga DPT (daftar pemilih tetap) tidak berubah dan tetap sama dengan pemilu sebelumnya. Masyarakat tidak begitu antusias dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 ini dikarenakan mereka kurang mengenal calon peserta dan latar belakang calon peserta yang akan maju dalam Pilkada ini. Peristiwa ini memicu tingakat partisipasi masyarakat yang semakin banyak dan masyarakat enggan untuk datang ket TPS dalam pelaksanaan pencoblosan. Jarak tempat tinggal masyarakat ke TPS sangat jauh dan mempersulit masyarakat untuk datang ke TPS itu. Banyak masyarakat yang lebih memilih golput dalam Pemilihan Gubernur Jatim Tahun 2013 alasannya tidak ada peningkatan bagi kehidupan mereka setelah mereka memilih calon tersebut menjadi pemimpin. Mereka berfikiran para calon tidak menjalankan kerjanya dengan baik seperti apa yang di bicarakan pada waktu kampanye, Rasa ketidak percayaan mereka lentur secara perlahan. Dengan ini masyarakat malas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu ini dan lebih memilih golput (golongan Putih).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 ini sudah cukup membaik perkembangan tingkat partisipasi masyarakatnya. Pelaksanaan sosialisasi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 ini KPU Kabupaten Malang berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 serta metode dan strateginya di rinci dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor.9/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Dalam strategi inti KPU Kabupaten Malang ini memperluas segmen atau pendekatan pendekatannya dan banyak kebijakan kebijakan yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten Malang seperti ujarnya Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini ST

> *"kebijakan dalam penekanan angka golput harus lebih di ketatkan lagi, karena kita belajar dalam pemilihan gubernur di tahun sebelumnya. Dalam pemutakhiran data harus lebih di ketatakan dengan cara bekerja sama dengan dispendukcapil, agar kecocokan data yang di miliki oleh DispendukCapil dengan yang di miliki KPU itu bener benerb sinkron, mulai dari pendataan kematian, pendataan pemilih yang berpindah temapy tinggalnya, yang mempunyai KTP ganda dan lain sebagainya. "* [109]

Menurut Catrl J.Federick sebagaimana di kutip Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud

[109] Anis Suhartini, (Malang 19 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan tujuan merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, Karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. [110]

Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Malang, di antaranya adalah (1) KPU Kabupaten Malang lebih mengetatkan dalam sosialisasi pemutakhiran data dengan mensikronkan data pemilih yang berada di Dispendukcapil dengan data DPT yang berada di KPU Kabupaten Malang. (2) KPU Kabupaten Malang memperbanyak melakukan trobosan-trobosan dengan mengadakan berbagai macam kegiatan sehingga keikut sertaan masyarakat dalam menggali informasi pemilu dan membuka wawasannya dapat tersalurkan dengan baik melauli kegiatan tersebut. (3) memberesi mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih serta memberikan tata cara mendaftarkan diri untuk menjadi pemilih dengan datang lansgsung ke kantor KPU Kabupaten Malang untuk mendaftarkan diri. (4) bekerja sama dengan dispendukcapil untuk pendataan akta kematian yang setiap tahunnya berubah ubah karena efek dari pendataan tersebut dengan berubah ubahnya DPT (daftar pemilih tetap). Strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Malang juga melakukan kerja sama dengan media sosial lainnya. Seperti bekerja sama dengan perusahaan radio sehingga dapat menyampaikan informasi tentang kepemiluan melalui siaran radio, bekerja sama dengan media cetak yang berupa koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya serta media- media lainnya. Ke-efektifan menjalin

[110]Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta Barat: Universitas Moestopo Baragama (Pers), 2014), 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kerjasama dengan dispendukcapil tujuannya untuk penekanan angka ganda yang ada di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kerjasama ini di buat lebih ketat lagi karena dengan pengalaman pemilihan sebelumnya di tahun 2013 yang kerjasamanya antara Dispendukcapil dengan KPU kurang efektif, karena pengapilkasiannya pada kedua pihak tersebut masih melakukakan pemutakhiran data secara manual meskipun tidak sepenuhnya. Pemutakhiran data untuk lebih efektifnya menggunakan teknologi aplikasi yang terbaru demi menghindari terjadinya angka ganda pada DPT.

Golput di wilayah Kabupaten Malang ini sudah tidak dapat di bendung lagi karena masyarakat sendiri sudah apatis terhadap pemilu dan itu melekat pada dirinya. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bekerja sama dalam mengatasi hal yang di anggap remeh. Banyaknya angka golput di indonesia adalah kesalahan dari berbagai pihak. Mungkin tidak begitu saja menghilangkan angka golput tapi setidaknya masyarakat dan pemerintahan mampu menekan angka golput dengan cara-cara tertentu di antaranya melibatkan mereka menjadi pemilih, berkontribusi pada keberhasilan pemilihan atau lain sebagainya.[111]

Rekapitulai hasil perolehan suara KPU Kabupaten Malang, menunjukkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.958.327 pemilih dengan rincian yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.139.349 dengan prosentase sebesar 58,2 % suara sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 818.978 suara dengan prosentase sebesar

[111]Mahardika Narendra, Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi SDM dan Parmas, Wawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang 5 September 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

41,8 %. Pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2018 di Kabupaten Malang menunjukkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.966.373 pemilih dengan rincian dengan rincian yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.244.355 suara , sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 740.114 suara, prosentase yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 37%.[112]

Kedua rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara dalam pemilihan gubernur pada tahun 2013 dan 2018 tersebut, diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 21,16. Semkakin tinggi prosentasenya semakin rendah tingkat ke partisipasinya, dan semakin rendah tingkat prosentasinya maka semakin tingi tingkat angka partisipasinya

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) Pasal 25 dapat menjadikan bukti bahwasannya

> "*negara mempunyai kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi serta menghormati juga mengakui hak pilih sebagai Hak Asasi Manusia".* [113]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) Pasal 23 yang berbunyi:

> *"(1) setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, (2) setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dana atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan*

[112]Kantor KPU Kabupaten Malang (Malang 19 September 2019).
[113]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kebutuhan. Bangsa."[114]

Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) yang menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilih ketika tidak mendaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sangat tidak adil. di satu sisi, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 memberikan kewajiban untuk mendaftar semua warga yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu lalai mendaftar seorang warga negara yang telah memiliki hak memilih, warga negara yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan atau kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya kepada warga negara.[115]

Pemilihan umum adalah sarana untuk berdemokrasi bagi warga negara dan hak warga negara yang di jamin oleh konstitusi, maksudanya hak atas kesempatan yang sama dalam hukum pemerintahan sebagaimana di atur dalam UUD 1945 yang berbunyi:

"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle".[116]

Menurut Anis Suhartini selaku Ketua KPU Kabupaten Malang mengatakan solusi dalam penekakan angka golput di antaranya adalah (1) mempermudah aturan bagi pemilih agar dapat menggunakan hak pilih (2) memperbaiki sistem

[114]Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
[115]http://jdih.tanjabtimkab.go.id/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/ di akses pada tanggal 4 oktober 2019 jam 16.35.
[116] Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pedataan dan pendaftaran pemilih sehingga menjadi lebih muda (dengan ini perlunya anggaran yang memadai dan dukungan dari masyarakat serta pemerintahan) (3) sistem pemilu yang digunakan pemilih harus mudah dipahami agar mereka bisa melindungi hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pencoblosan nanti (4) membangun kesadaran serta menanamkan jiwa patriotisme terhadap sebuah pesta demokrasi demi keberhasilan pemilu. (5) waktu dalam melaksanakan sosialisasi, serta belajar dalam pemilu harus disediakan dengan cukup baik. Tidak tumpeng tindih atau bertabrakan dengan kegiatan lainnya. [117]

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan DaerahKabupaten Kota.[118]

PKPU tidak tercatat dalam hierarki perundang-undangan di atas. Jika kita membaca dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kita tidak dapat menemukan kalimat “peraturan KPU” didalamnya. Akan tetapi PKPU adalah bagian dari hierarki perundang-undangan secara nyata dalam substansinya yang berada pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No.12 Tahun 2011. Ketentuan ayat (1) menyebutkan bahwa: jenis peraturan perundang

[117]Anis Suhartini, (Malang 4 September 2019).
[118]Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau pemerintah atas Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Bupati, Walikota, Kepala Desa, atau setingkat. Ketentuan Ayat (2) menyebutkan bahwa : peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[119] Dikemukakan juga dalam teori perundang- undangan Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, dalam artian norma yang lebih rendah bersumber dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma tersebut akan terus membentuk suatu tingkatan hingga norma teratas yang sudah tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotesis, fiktif, yang disebut sebagai dasar atau *Groundnorm*. Norma ini bersifat *presupposed* artinya ditetapkan oleh masyarakat secara bersama sama.

Ketentuan yang dimaksud di atas mengatakan bahwa sudah jelas bahwa PKPU di masukkan dalam kategori sebagai peraturan yang ditetapkan oleh

[119]Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undnag-undang. Sudah jelas bahwa PKPU di akui keberadaannya karena PKPU adalah sama-sama produk hukum secara sifatnya mengikat yang berisikan norma- norma hukum secara tertulis kedudukannnya sama dengan undang-undang karena diperintahakan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPU. PKPU juga adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU dalam menyusun pelaksanaan pemilu. PKPU ini adalah untuk acuan dalam pelaksanaan teknis penyelenggaran pemilu yang berlangsung sesuai ketertiban dan mempunyai kepastian hukum.

PKPU ini guna untuk bisa menyadarkan setiap warga negara untuk mentaati peraturan perundang-undangan termasuk PKPU serta keputusan-keputusan yang dikeluarkannya demi berlangsungnya pemilu yang tertib sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Peraturan yang dikeluarkan KPU atau disebut dengan PKPU merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan berisikan norma norma hukum yang sifatnya secara mengikat dan secara umum yang telah di bentuk dan di tetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang yang melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosiaslisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penyelenggaraan yang artinya pemberlakuan peraturan ini bersifat terus menerus dan berkelanjutan yang harus di patuhi dan di taati secara terus menerus dalam jangka panjang, tetapi keputusan yang dikeluarkan KPU seperti halnya pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts KPU-Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor.9/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 ini sifatnya sekali selesai. Artinya keputusan ini hanya di berlakukan sekali waktu atau sekali pemilihan saja dalam waktu tertentu. Keputusan itu juga tidak berlaku secara terus menerus. Keputusan juga salah satu wewenang KPU dalam Penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Maupun Dalam Penyelenggara Pemilu Peresiden Dan Wakil Presiden.

E. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Golput (golongan putih)

Golput (golongan putih) dalam pemilu terdapat dua ulama' yang telah menetapkan hukum golput (golongan putih) dalam pemilu, yaitu Said Aqil Siraj (Rais Syuriah NU) dan A. Sudarmadji (Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia.

Said Aqil Siraj menulis artikelnya yang berjudul "Islam dan Golput" yang dimuat oleh Republika (17 November 2003). Artikel tersebut, Said Aqil Siraj

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyebutkan bahwa *pertama*, pertikaian antara Ali Bin Abi Thalib dengan Thalhah dan Zubair yang mendapat dukungan dari Aisyah ra., melahirkan sekelompok umat islam yang dimotori oleh Abdullah Ibn Umar yang membentuk poros tengah memilih sikat tidak ikut serta dalam pertempuran.[120]Sikap ini dikategorikan sebagai golput oleh Said Aqil Siraj. *Kedua,* Murji'ah yang bersikap tidak memberikan sikap terhadap para pelaku dosa besar (*murtakib al-kabir)* apakah mereka masih mukmin atau sudah kafir, dianggap sebagai sikap abstain yang semisal dengan golput oleh Said Aqil Siraj; dan *ketiga*, hukum berpartisipasi dalam pemilu adalah *mandub* (Sunnah) atau paling tidak, fardhu kifayah. Golput dalam pemilu dianggap sebagai sikap dan pekerjaan yang dibolehkan (mubah) menurut syariat.

Berbeda dengan pendapat Aqil Siraj, S. Sudarmaji (Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia) berpendapat bahwa haram hukumnya bagi umat islam memilih golput dalam pemilu dengan tidak menggunakan hak pilihnya, argumentasi yang dikemukakan A.Sudarmaji adalah *pertama* , pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib di taati; dan *kedua*, sikap memilih golput akan merugikan umat islam sendiri karena sikap golput berarti membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya; dan akibatnya adalah akan tampilnya seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kaum muslimin.[121]

[120] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah*,74.
[121] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah*,74.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hak pilih warga negara dalam pemilu, MUI memandangnya sebagai suatu amanat yang harus di tunaikan. Dasarnya terdapat pada Surat An Nisa' (4): 58 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) aabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dali. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. "[122]

Amanat ini harus di tunaikan, maka hak pilih harus di tunaikan, yaitu harus disampaikan kepada pihak atau orang yang berhak menerimanya. Yaitu mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. MUI memandang agama sebagai syarat utama. Umat islam harus di pimpin muslimlah yang tahu dan mau memperhatikan urusan-urusan umat islam oleh karena itu, seseorang tahu bahwa ada pemimpin yang mampu atau memenuhi syarat memimpin sedangkan ia tidak menyalurkan hak pilihnya (golput) maka di anggap telah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya yang jelas-jelas dilarang oleh agama. [123]

Peristiwa golput di Kabupaten Malang perlunya dimimalisir dengan cepat dengan cara memahami akar permasalahan yang menyebabkan golput itu terjadi. Golput di Kabupaten Malang ini disebabkan kurangnya sosialisasi serta pendidikan pemilu atau pendidikan politik yang di lakukan oleh KPU atau

[122]Al-Qur'an Surat An-Nisa'.
[123]Dwi Hariono *Hadis Dalam Pusaran Pemilu (mengkaji pemahaman hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu),* Volume 12 No.1 Januari 2018, 15.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

partai politik itu sendiri maka yang harus dilakukan dengan bijak oleh para politisi adalah dengan melakukan sosialisasi pendidikan politik guna dapat menyadarkan, memahamkan dan membuka wawasan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dan melindungi hak pilhnya. Peningkatan jumlah golput dalam pemilihan kepala daerah ini dapat dijadikan intropeksi diri badan penyelenggara serta partai politik agar bisa memperbaiki setiap tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum yang dimulai dari pendataan pemilih, sosialisasi, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait yang di antaranya pihak media baik cetak atau audio visual dan bekerja sama dengan pemerintahan daerah agar mereka dapat memberikan pendidikan politik yang berkesinambungan secara terus menerus baik dalam dunia pekerjaan sekolah atau yang lainnya.

Faktor yang menyebabkan timbulnya peristiwa golput di masyarakat ini adalah malas memilih calon atau tingkat kesibukan dalam beraktifitasnya lebih di utamakan, dan mereka terkadang mulai jenuh dengan banyaknya pemilihan pemilihan dengan mereka berfikiran bahwa memilih atau tidak memilihpun tidak akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Tingkat kesadaran dan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan perlu diberikan. Masyrakat merasa bahwa calon pemimpin yang akan maju menganggap kurang kredibel, terkadang masyarakat juga di paksa untuk tidak golput dengan cara menyogok agar memilih calon itu dengan membayarnya. Perlu adanya kesadaran dan kejujuran dalam memilih, karena memilih itu salah satu bentuk nasionalisme.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemilihan umum dalam rangka "pesta demokrasi "seperti Indonesia tidak pernah ada dalam sistem pemerintahan islam, sebenarnya sistem pilpres langsung, pemilihan gubernur langsung. Perlu di telaah ulang dampak negatifnya yang lebih banyak. Tahu, yang wajib adalah terbentuknya kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan berjalannya syariat islam dengan utuh, tidak dapat terwujud tanpa adanya pemerintahan yang adil dan bijaksana maka dari itu wujudnya pemerintahan merupakan wajib.[124]

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"*segala sesuat yang sudah menjadi wajib, maka hukumnya wajib sebagaimana kewajiban tersebut "*

Mewujudkan pemerintahan tidaklah harus dengan pemilihan umum, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, pemilihan umum ini menjadi fardhu kifayah. Golput (golongan putih) dikatakan haram jika mempunyai dugaan bahwa dengan adanya golput, cita cita tidak dapat terwujud, dan jika kita yakin atau tidak berprasangka cita cita itu akan terlaksana maka golput itu tidak masalah atau tidak haram. Ada dua pendapat di kalangan ulama yaitu:

1. Golput (golongan putih) di hukumi haram dengan mengacu bahwa *"khitob"* (tuntutan) *fardhu kifayah* asalnya di tetapkan pada individu dan akan gugur setelah keyakinan atau berprasangka *(dhan)* bahwa kewajiban itu sudah berhasil tanpa kita, maka dalam keadaan ragu masih wajib.

[124]Abdul Afif, dkk, *Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi di media sosial dengan rujukan Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas,* (Yogyakarta, Penerbit Titik Jogja Banget, 2015), 4585.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Golput tidak haram, melihat asal *fardhu kifayah* bukan *khitob* untuk semua individu, tetapi kepada sebagian kelompok yang tidak tertentu. dapat menjadi kewajiban setiap individu, jika yakin atau *dhan* belum terlaksana berarti kalua ragu belum menjadi wajib. Pendapat yang lebih benar yang pertama. disebabkan kemungkinan arah *khitob* tersebut dengan melihat dua pandangan sebagai berikut: melihat tidak ada melakukan sama sekali yang berosa asalah semua individu, maka arah *khitob fardu kifayah* pada individu. [125]

Al-Qur'an dan Hadis Rosulullah SAW tidak menjelaskan secara detail tentang permasalahan golput (Golongan Putih) tetapi kepemimpinan dalam hukum islam merupakan hal terpenting adanya. Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Al-Qur'an dikatakan beberapa istilah kepemimpinan dengan kata khilafah, wali, imamah, atau dengan kata ulil amr dan lain sebagainya.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

[125]Abdul Afif, dkk, *Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi di media sosial dengan rujukan Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas*, 4585.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemimpin menurut islam jika di tinjau dari segi keagamaan dalam konteks fikih, pemilu masuk dalam kategori *nashibul imam* yang hukumya fardhu kifayah. Rosulullah SAW telah mengingatkan dengan sebuah Hadisnya melalui Abi Hurairah ra :

> "*akan datang setelahku para pemimpin, orang yang baik akan menjadi pemimpin kalian dengan kebaikannya, dan orang yang jahat akan menjdai pemimpin kalian dengan kejahatannya. Maka dengarlah mereka dan taatilah segala hal yang sesuai dengan kebenarannya. Jika mereka berbuat baik maka kebaikan itu menguntungkan kalian dan mereka juga, dan apabila mereka berbuat jahat, maka kalian akan mendapatkan pahala ketaatan, dan mereka akan mendapatkan dosa kejahatnnya".*

Di antara karakteristik pemimpin islam adalah :[126]

1) Beriman dan bertakwa kepada allah. Karena kepemimpinan itu terkait erat dengan pencapaian suatu cita-cita. Kepemimpinan harus berada di dalam genggaman tangan seorang pemimpin beriman kepada allah/ allah sudh tegas melarang kita mengangkat atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin.
2) Jujur dan bermoral. Pemimpin islam harus jujur baik kepada dirinya sendiri atau kepada pengikutnya sehingga akan menjadi contoh terbaik yang sejalan antara perkataan dengan pebuatannya. Selain itu, perlu memiliki moralitas yang baik, berakhlak terpuji, teguh memegang amanah, dan tidak suka bermaksiat kepada allah seperti korupsi, manipulasi, dusta, khianat.
3) Kompeten dalam berilmu pengetahuan. Seorang pemimpin yang islami haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, sehingga orang akan mengikutinya karena yakin dengan kemampuannya. Selayaknya

[126]Veithzal Rivai, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spritual*, 256.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seorang pemimpin, selain memiliki pengetahuan agama yang dalam juga mempunyai pengetahuan yang luas mencakup pengetahuan administrasi kenegaraan, ekonomi, politik, sosial dan hukum,

4) Peduli terhadap rakyatnya."

Ulama sepakat bahwa umat islam wajib memiliki pemimpin. Akan tetapi, cara pengangkatan pemimpin dalam pandangan umat islam Sunni dan Indonesia termasuk didalamnya tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Al-Mawardi dalam memilih imam/pemimpin harus diperlukan beberapa hal di antaranya adalah *pertama ahl al ikhtiar* atau yang berwewenang untuk memilih imam bagi umat, harus memenuhi 3 (tiga) syarat di antaranya adalah (1) memiliki sikap adil. (2) memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam. (3) memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling mampu mengelola kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. *Kedua, ahl al-Imamah* atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam, mereka harus memiliki tujuh syarat diantaranya adalah : (1) sikap adil dengan segala persyaratannya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad (3) sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya; (4) utuh anggota tubuhnya; (5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum; (6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh; (7) keturunan Quraisy. kemudian terdapat dua cara pengangkatan imam, *pertama*, dengan cara pemilihan oleh *Ahl al-Aqdi wa al-*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hali, mereka yang mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurangi itulah yang disebut dengan "*ahl al-ikhtiar*. *Kedua* penunjukan atau wasiat oleh imam sebelumnya. Katua pengangkatan melalui pemilihan, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang jumlah peserta dalam pemilihan. [127]

Sejumlah ulama telah menginformasikan pendapatnya mengenai hukum mengangkat pemimpin. diantara mereka adalah Al-Mawardi (w.450 H), (w.458 H), Ibn Taimiyah (661-728 H), Muhammad Al-Mubarak, Mahmud Hilmi, dan Ibrahim Hosen (w. 2002 M). Pendapat al-Mawardi tentang hukum mengangkat pemimpin dapat dilihat dari tiga pertanyataannya: *pertama*, kepemimpinan diperlukan untuk memelihara agama dan kepentingan duniawi umat Islam: hukum menetapkan adanya pemimpin bagi umat Islam adalah wajib berdasarkan ijma'. Ulama berbeda pendapat tentang kewajiban tersebut: apakah kewajiban mengangkat pemimpin termasuk wajib yang bersifat *'aqli* atau kewajiban yang bersifat *'aqli* atau kewajiban yang bersifat *syar'i*. *Kedua*, dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat umat islam agar taat kepada-nya, kepada Rasul-Nya, dan kepada pemimpinan (*ul al-amr).* Perintah taat kepada pemimpin: secara tidak langsung, adalah perintah agar umat islam agar memiliki pemimpin; dan *ketiga*, hukum mengangkat pemimpin adalah fardhu kifayah, laksana jihad dan mencari ilmu. Oleh karena itu, kewajiban itu telah hilang apabila sudah dijalankan oleh yang lain.

Pendapat Abi Ya'la tentang hukum mengangkat pemimpin dapat dilihat dari tiga pernyataannya: *pertama*, keberadaan pemimpin (bagi umat islam) adalah

[127]Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran,* (Jakarta : UI Press, 2011), 64.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wajib. Alasannya adalah sebuah riwayat yang disandarkan kepada al-Humashi yang mengatakan bahwa "akan terjadi fitnah bila tidak ada pemimpin yang menjaga urusan manusia" (*al-fitnatidzalamyakun imam yaqum biamr al-nas); kedua*, cara memperoleh hukum wajib tersebut adalah melalui informasi wahyu (*al-sam),* bukan berdasarkan logika atau akal, karena akal tidak dapat mengetahui kewajiban; juga tidak dapat mengangkat pemimpin adalah farhu kifayah. Ia boleh dipilih dari kalangan mujtahid atau boleh juga melalui pengakuan seseorang terhadap orang lain yang mencukupi syaratuntuk menjadi pemimpin. [128]

Pendapat Ibn Taimiyah tentang hukum mengangkat pemimpin dapat dilihat dari tiga pernyataaanya; *pertama*, kewajiban mengangkat pemimpin adalah kewajiban agama yang paling besar; karena agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin. Kemaslaatan manusia tidak akan teak kecuali dengan adanya pemimpin. Kemaslahatan manusia tidak akan terwujud kecuali melalui hidup bermasyarakat, karena manusia yang satu memerlukan manusia yang satu memerlukan manusia yang lainnya; masyarakat mesti (harus) memiliki pemimpin sehingga Nabi SAW. Bersabda: "apabila tiga orang Muslim melakukan perjalanan, maka salah seorangnya harus menjadi pemimpin" (*idza kharaja tsalatsat fi safar fa "lyu' amiru ahadahum),* dan Nabi Muhamamad SAW. Juga bersabda: "tidak halal tiga orang muslim berada di suatu tempat kecuali salah seorang diantara menjadi pemimpin "(*layahillu litsalatsat yakununa bi falat min al-ardh illa 'amaru 'alayhim ahaduhum*) ;

[128] Jaih Mubarrok,, *Fiqih Siyasah*, 66.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kedua, Allah SWT mewajibkan umat islam untuk melakukan *amr ma'ruf wa al-nahy an al-munkar;* penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar tidak akan sempurna kecuali dengan kekuatan dan pemerintahan. Begitu juga melakukan ijtihad, menegakkan keadilan, melaksanakan ibadah haji, menolong orang teraniaya, menegakkan keadilan, melaksanakan ibdah haji, menolong orang yang teraniaya, menegakkan hukum pidana, tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kekuatan dan pemerintahan. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa pemimpin adalah wakil Tuhan di bumi (*inna al-sulthan zhill Allah fi al-ardh)* ; disamping itu, ia pun mengatakan bahwa adanya pemimpin yang dzalim itu lebih baik daripada tidak ada pemipin; ia berkata (*situna sanat min imam ja'ir ashlah min laylat bi la sulthan*); dan *ketiga*, kewajiban mengangkat pemimpin adalah untuk mendekatkan diri kepada allah yang dilakukan dengan cara mentaati-Nya dan rasul-Nya, adalah cara yang paling utama dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. [129]

Muhammad Al-Mubarrak berpendapat bahwa umat Islam wajib mempunyai pemimpin karena: *pertama*, umat islam memerlukan keamanan dalam negeri, menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari serangan negara lain, memelihara agama supaya senantiasa berkembang, dan menjaganya agar tidak rusak; dan *kedua*, penegak keadilan dan menumpas kezhaliman tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin.

Pendapat Mahmud Hilmi tentang kewajiban adanya pemimpin bagi umat islam dapat dilihat pada tiga pernyataannya, *pertama*, khutbah Abu Bakar

[129] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah*, 66.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

setelah dilantik menjadi khalifah dan *ijma'* sahabat (ketika mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah), menunjukkan bahwa adanya pemimpin bagi umat islam setelah nabi Muhammad Saw. Wafat adalah wajib; *kedua,* kewajiban adanya pemimpin adalah wajib berdasarkan ijma' dan kewajiban tersebut beesifat *aqli* dengan urutan berfikir sebagai berikut: " kebahagiaan manusia yang bersifat duniawi dan ukhrawi tidak akan tegak dengan sempurna kecuali dengan tegaknya pemerintah islam yang didasarkan agama; dan *ketiga* hukum adanya pemimpin adalah wajib kifayah; apabila ia ditegakkan oleh sebagian penduduk yang lain, maka kewajiban bagi penduduk lainnya telah gugur Menurut Ibrahim Hosen, mengangkat kepala negara adalah wajib *syar'I* dan *aqli,* dengan beberapa pertimbangan; *pertama,* terwujudnya kemaslahatan umum sangat bergantung pada adanya amar ma'ruf nahi munkar. Pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Munkar menghendaki adanya pemimpin, sebab Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah mengatakan bahwa kelompok terkecil diwajibkan mengangkat pemimpin. Hadis yang dimaksud oleh Ibrahim Hosen adalah beberapa riwayat sebagai berikut : [130]

عن أبي هر ير ة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قا ل : من أ طاعنى فقد اطا ع الله و من يصني فقد عصى الله ومن يطع الا مير فقد اطا عنى ومن يعص الآ مير فقد عصا ني

"*dari Abu Hurairah ra. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda : barang siapa yang taat kepadaku, berarti taat kepada Allah; dan yang maksiat (tidak taat) kepadaku berarti telah maksiat kepada allah; barang siapa yang taat kepadaku berarti taat kepadaku ; dan yang tidak taat kepada pemimpin berarti tidak taat kepadaku."*

[130] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah,* 67.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عن أبي هر ير ة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قا ل : عليك السمع

والطا عة فى عسرك ويسرك ومنشطك ومكر هك واثرة عليك

"*dari Abu Hurairah ra. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda : engkau wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin), baik pemimpin itu menyulitkanmu maupun mempermudah kamu, menggembirakan kamu ataupun melahirkan kebencian kepadamu ; itu adalah kewajiban yang terpuji bagimu.*

Riwayat tersebut tidak menjelaskan secara ekplisit mengenai kewajiban mengangkat pemimpin, akan tetapi yang ada secara ekplisit adalah kewajiban untuk mentaati pemimpin. Kewajiban mengangkat pemimpin berdasarkan Hadis-Hadis tersebut didapatkan secara ekplisit. Fiqih terdapat satu cabang ilmu yang penting peranannya dalam melakukan *istinbath* hukum, yaitu ilmu kaidah fikih dan pemahaman implisit mengenai kewajiban mengangkat pemimpin dapat dipahami dengan menggunakan kaidah fikih. [131]

Menurut Yusuf Qardhawi dalam menentukan hukum golput dalam pemilu dari sudut pandang ilmu logika dalam fikih, kaidah yang tepat digunakan adalah *lays kullu ma ada ila al fardh fardhan.*. Hukum golput dalam pemilu adalah *ibahat/ mubah,* karena cukup diwakili oleh anggota masyarakat muslim yang lain. Pemilu dengan berbagai implikasiannya termasuk masalah-masalah yang lahir setelah Al-Quran diturunkan dan Sunnah telah selesai disabdakan, ia tidak memiliki tempat yang khusus dalam sumber ajaran tersebut ia memiliki peran penting dalam hidup bernegara. Hukum partisipasi pemilu itu termasuk

[131] Jaih Mubarro, *Fiqih Siyasah,* 84.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wilayah ijtihadi. dalam wilayah ijtihadi, wajar bila kongres Alim Ulama di Medan (1953) berbeda dengan keputusan Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar; dan Said Aqil Siradj juga berpendapat dengan dua keputusan sebelumnya. Menunjukkan khazanah yang dapat memperkaya fikih islam dan sekaligus mendorong kita untuk bersikap dan hidup semakin cerdas dalam mencermati perbedaan perbedaan tersebut. [132]

Sejumlah teks perundang-undangan dikatakan bahwa negara yang demokratis, rakyat berhak dipilih untuk menjadi pemimpin dan berhak memilih pemimpin. Memilih dan dipilih adalah hak setiap manusia (bukan kewajiban). implikasinya adalah bahwa hak itu boleh dilaksanakan. Pemilik hak memiliki hak *khiyar* terhadap hak yang dimilikinya. Hak dipasangkan atau bahkan di pertentangkan dengan kewajiban. Kewajiban itu harus dilakukan sedangkan hak tidak mesti dilakukan, para pemilih berhak memilih (bukan berkewajiban memilih), keberadaan golput mesti di tolelir dan dihukumi *mubah,* apabila semua masyarakat bersikap golput yaitu tidak berpartisipasi dalam pemilu akan melahirkan suatu keadaan yang dilarang oleh agama. Jalan tengah yang bijaksana adalah hukum berpartisipasi dalam pemilu adalah fardhukifayah. Hukum golput (sebagai pihak yang menolak berpartisipasi dalam pemilu) dapat dibedakan menjadi dua: *pertama,* golput yang bersifat personal atau individual tanpa mengajak yang lain dihukumi *mubah. Kedua,* golput yang bersifat atraktif dengan mengajak pihak lain untuk melakukan hal yang sama dihukumi *makruh*; dan hukum memaksa orang lain untuk golput dalam pemilu adalah

[132] Jaih Mubarrok, *Fiqih Siyasah,* 85.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

haram, karena pemaksaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Golput adalah salah satu persoalan yang di sebabkan perilaku *money politik* dengan menciptakan persaingan pemilu yang tidak adil atau tidak fair. Pemilih itu dikendalikan oleh materi bukan hati, faktanya pemimpin yang menang dengan menggunakan money politik itu tidak bisa diberi amanah. Pemimpin yang menang dengan menggunakan money politik itu akan membawa mala petaka bagi umat islam, hukumnya haram dan masyarakat yang tidak kecipratan money politik juga haram sebab peristiwa ini dapat merusak akal yang di dalam agama itu akal harus di tegakkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas di atas maka dapat di simpulkan bahwasannya :

1. Berdsarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts.KPU-Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Kinerja KPU dalam malakukan strategi penekanan angka golput kurang efektif yang dikarenakan banyaknya tahapan yang tumpeng tindih, jadi kurang maksimalnya dalam pelaksanaan sosialisasi serta kegiatan lainnya sehingga dalam pemilihan gubernur 2013 banyak di temukan masyarakat yang tidak memilih (golput) dan banyaknya kegandaan dalam data pemilih, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor.9/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis pemilih Pelaksanaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Cakupannya lebih luas serta pendekatannya ke pada masyarakat lebih mengkerucut lagi. kinerja KPU sudah cukup membaik dan efektif. Tingkat golput di KPU Kabupaten Malang dalam pemilihan gubernur 2013 dan 2018 mengalami peningkatan dengan rincian jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.958.327 pemilih dengan rincian yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.139.349 prosentase sebesar 58,2% suara, yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 818.978 suara prosentase sebesar 41,8%. Pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2018 di Kabupaten Malang menunjukkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.966.373 pemilih dengan rincian yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.244.355 suara, yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 740.114 suara jadi prosentase yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 37%. Kedua pemilu tersebut rekapitulasi perhitungan hasil perolehan sura dalam pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013 & 2018 dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 26,1%. Faktor yang menyebabkan golput itu terjadi (1) malas memilih calon atau tingkat kesibukan dalam beraktifitasnya lebih di utamakan, (2) mereka mulai jenuh dengan banyaknya pemilihan pemilihan dengan mereka berfikiran bahwa memilih atau tidak memilihpun tidak akan berpengaruh terhadap kehidupannya, (3) tempat TPS yang jauh dari tempat tinggalnya sehingga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat malas untuk datang pada saat hari pencoblosan (4) banyak yang belum melaporkan akta kematian kepada Dispendukcapil, (5) masyarakat yang sudah tertanam sifat apatis. (6) kurang mengenal latar belakang calon peserta pemilu (7) kurangnya memining informasi dan wawasan dalam seputar pemilu dan lain sebagainya.

2. Mewujudkan pemerintahan tidaklah harus dengan pemilihan umum, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, pemilihan umum ini menjadi fardhu kifayah. Golput (golongan putih) dikatakan haram jika mempunyai dugaan bahwa dengan adanya golput, cita cita tidak dapat terwujud, dan jika kita yakin atau tidak berprasangka cita cita itu akan terlaksana maka golput itu tidak masalah atau tidak haram. Ada dua pendapat di kalangan ulama yaitu:
   a. Golput (golongan putih) di hukumi haram dengan mengacu bahwa *"khitob"* (tuntutan) *fardhu kifayah* asalnya di tetapkan pada individu dan akan gugur setelah keyakinan atau berprasangka *(dhan)* bahwa kewajiban itu sudah berhasil tanpa kita, maka dalam keadaan ragu masih wajib.
   b. Golput tidak haram, melihat asal fardhu kifayah bukan khitob untuk semua individu, tetapi kepada sebagian kelompok yang tidak tertentu. jika yakin atau *dhan* belum terlaksana berarti kalua ragu belum menjadi wajib. Pendapat yang lebih benar yang pertama. Hal ini disebabkan kemungkinan arah khitob tersebut dengan melihat dua pandangan sebagai berikut: melihat tidak ada melakukan sama sekali yang berosa asalah semua individu, maka arah khitob fardu kifayah pada individu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. SARAN

Berdasarkan hasil peneleitian pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki beberapa saran dan masukan yaitu :

1. Sosialisasi lebih di perluas lagi hingga turun ke tingkat desa sampai dusun sehingga masyarakat yang benar-benar bertempat tinggal di pelosok tidak ketinggalan informasi dengan kendala jaringan yang kurang memadai.
2. Lokasi TPS seharusnya tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat sehingga msyarakat mudah menjangkaunya dan tidak malas untuk datang ke TPS pada saat pencoblosan.
3. Kebijakan yang di ambil harus di tinjau ulang agar bisa di terima dengan baik dan di jalankan semaksimal mungkin.
4. Memperbanyak cara / metode dalam menyampaikan sosialisasi sehingga masyarakat tidak jenuh dengan cara penyampaiannnya yang tiap tahunnya sama.
5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan SKPD terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.
6. Aplikasi dalam pemutakhiran data di nilai kurang tepat karena masih banyak pergeseran data pemilih.
7. Untuk website atau laman KPU lebih di tekankan lagi dan di perbaiki sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdurrahman.Soejono, 1999, *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta,

Achmadi Cholid Narbuko an Abu, 2003, *Metodelogi Penelitian* ,Jakarta: PT. Bumi Aksara,

Amiruddi, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Gajah Mada University Press

Anggito Albi & Afif,Abdul dkk, 2015 *Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi di media sosial dengan rujukan Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas,*Yogyakarta, Penerbit Titik Jogja Banget,

Budarjo Miriam, 1998 *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,

Budiarto, , Eko SKM & Dr.Dewi Anggraeni, 2003, *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*, Jakarta : Kedokteran EGC,

Bungin.M.Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, kebijakan public, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, M,Si.* , Jakarta : Kencana Prenada Group,

Dedi Amrizal, 2015 Ahmad Hidayah Dalmunthe, Yusriati, *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*,

Efriza,Yoyoh Rohaniah ,2015 *Pengantar Ilmu Politik*, Malang, Intrans Publishing,

Heru Widodo, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

.J Kaloh, SU, 2008 *Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka,

JPPR bersama Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), 2015, *Potret Pemilu Akses Dalam Pilpres 2014 di Indonesia: Hasil Pemantauan di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan and Sulawesi selatan*, (Digital Lines Distributor,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Johan Setiawan, 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak,

Marzuki , 1983, *Metodelogi Riset* Yogyakarta : PT. Hanamidita Offset

Moloeng,Lexy J, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung :Remaja Rosdakarya

Mubarok Jaih, 2005 *Fiqih Siyasah,* Bandung : Pustaka Bani Quraisy

Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* Jakarta : Prenada Media Grup, 2005).

Musliichah, 2016 *Bunga Rampai Kearsipan*, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press

Ranggawidjaja Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta : Mandar Maju,1998

Rivai Veithzal, M.B.A, H. Arviyan Arifin, 2009, *Islamic Leadership Membangun Super Leadership Melalui Kecerdasan Spritual*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset,

Suharismi Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta : Rieneka Cipta

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta

Sumarsono, 2006 dkk, , *Pendidikan Kewarganegaraan.*Jakarta:Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,

Sutaryo, 2004, *Dasar-Dasar Sosialisasi* Jakarta : Rajawali Press

Syadzali Munawir, M.,A, 2011, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran,* Jakarta : UI Press

Soekanto Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : Universitas Indonesia Press,

Sikumbang Sony Maulana, dkk. *Modul Pengantar Ilmu Perundang-Undangan.*

Saleh,dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu,.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

. Taufiqurokhman, 2014, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta Barat : Universitas Moestopo Baragama (Pers)

Tim Penyusun *Pedoman Karya Penulisan Ilmiyah Fakultas Syariah*

Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Jakarta, Sinar Grafika

Wignjosoebrot Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*,,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts?KPU-Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor.9/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.
Al-Qur'an Al-Karim

Internet Akases

http://jdih.tanjabtimkab.go.id/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/ di

akses pada tanggal 4 oktober 2019 jam 16.35

Jurnal. *Hadis Dalam Pusaran PEmilu (mengkaji pemahaman hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu),* Volume 12 No.1 Januari 2018.

Skripsi

Ghufron, *Fatwa PEnggunaan Hak Pilih dalam Pemilu (Analisis Terhadap*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketetapan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa MAjelis Ulama' Indonesia se-Indonesia III Tahun 2009, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,2009)

Kurniawan Ansar *"Golput dalam Prespektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Kota Makasar)* Kurniawan Ansar, Nim 10200114058, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2019.

Muhammad Syafi'I, *Golput dalam Prespektif Fiqih Siyasah (Studi analisis Perilaku Politik Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014),* jurusan jinayah siyasah fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015

Mohd Ridzuan Mohamad *"Golongan Putih (Golput) menurut Pandangan Elit Politik Islam di Malaysia*, Nim 109045200010, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Draf Pertanyaan

1) Apa yang melatar belakangi golput dalam pemilihan gubernur jawa timur tahun 2013 dan 2018?
2) Strategi apa yang di lakukan KPU Kabupaten Malang Menekan Angka Golput?
3) Faktor apa saja yang menyebabkan tinggi rendahnya golput di wilayah Kabupaten Malang.
4) Bagaimana Pendapat anda tentang golput yang terjadi di pemilih pemula? Bagaimana solusi atau kebijakan dalam menekan angka golput?
5) Apakah golput adalah cerminan dari kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan tanggung jawab mereka dalam bernegara? Mengingat masyarakat mayoritas bertempat tinggal di pelosok desa ?
6) Bagaimana cara anda merangkul masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi yang di adakan oleh KPU Kabupaten Malang?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 1. Wawancara Ketua Kpu Kabupaten Malang



Gambar 2. Wawancara Komisioner Kpu Kabupaten Malang Divisi Sdm Dan Parmas



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 3. Wawancara Sekretaris Kpu Kabupaten Malang



Gambar 4. Wawancara Kasubag Program Dan Data Kpu Kabupaten Malang



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 5. Wawancara Dengan Staf Kpu Kab Malang



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1

Hasil Rekap Perhitungan Pilgub Tahun 2013

LAMPIRAN
MODEL DB 1 KWK. KPU

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR/DIPINDAHKAN
		KEC. DONOMULYO	KECAMATAN PAGAK	KEC. BANTUR	KEC. SUMBERMANJING WETAN	KEC. DAMPIT	KEC. AMPELGADING	KEC. PONCOKUSUMO	KEC. WAJAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drs. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH YUSUF	12.117	8.449	13.012	22.792	26.738	12.462	21.871	17.102	134.543
2	Drs. H. EGGI SUDJANA, SH., M.Si dan Drs. MOCH. SIHAD	1.246	687	833	1.663	1.665	831	1.601	1.179	9.705
3	Drs. BAMBANG DH. M.Pd dan MH. SAID ABDULLAH	3.746	2.848	2.914	4.503	6.751	3.349	4.884	3.920	32.915
4	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan H. HERMAN S. SUMAWIREDJA	10.433	6.082	10.446	16.273	20.040	8.547	13.686	13.465	98.972
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA		27.542	18.066	27.205	45.231	55.194	25.189	42.042	35.666	276.135

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MALANG

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

Page 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2

Hasil Rekap Perhitungan Pilgub Tahun 2013

LAMPIRAN
MODEL DB 1 KWK. KPU

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR/DIPINDAHKAN
		Jumlah Pindahan	KEC. TUREN	KEC. GONDANGLEGI	KEC. KALIPARE	KEC. SUMBERPUCUNG	KEC. KEPANJEN	KEC. BULULAWANG	KEC. TAJINAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drs. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH YUSUF	134.543	26.249	14.305	11.569	10.538	20.527	14.071	12.427	244.229
2	Drs. H. EGGI SUDJANA, SH., M.Si dan Drs. MOCH. SIHAD	9.705	1.254	605	1.009	822	1.251	621	624	15.891
3	Drs. BAMBANG DH. M.Pd dan MH. SAID ABDULLAH	32.915	4.839	1.933	5.335	3.564	5.183	2.287	2.353	58.469
4	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan H. HERMAN S. SUMAWIREDJA	98.972	17.329	15.531	3.909	8.509	13.008	11.827	7.794	188.879
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA		276.135	49.671	32.374	27.882	23.433	45.969	28.806	23.198	507.468

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MALANG

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

Page 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 3

Hasil Rekap Perhitungan Pilgub Tahun 2013

LAMPIRAN
MODEL DB 1 KWK. KPU

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR/DIPINDAHKAN
		Jumlah Pindahan	KEC. TUMPANG	KEC. JABUNG	KEC. PAKIS	KEC. PAKISAJI	KEC. NGAJUM	KEC. WAGIR	KEC. DAU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drs. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH YUSUF	244.229	20.188	17.337	31.936	17.604	9.868	18.840	17.438	377.440
2	Drs. H. EGGI SUDJANA, SH., M.Si dan Drs. MOCH. SIHAD	15.831	1.130	1.238	1.614	1.139	761	1.460	934	24.227
3	Drs. BAMBANG DH. M.Pd dan MH. SAID ABDULLAH	58.469	3.445	2.833	4.325	5.107	2.664	6.346	3.510	87.353
4	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan H. HERMAN S. SUMAWIREDJA	188.879	9.511	11.019	18.825	14.651	9.767	13.223	8.227	274.102
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA	507.468	34.274	32.487	57.300	38.501	23.060	39.869	30.169	763.128

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MALANG

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

Page 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4

Hasil Rekap Perhitungan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013

LAMPIRAN
MODEL DB 1 KWK. KPU

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR/DIPINDAHKAN
		Jumlah Pindahan	KEC. KARANGPLOSO	KEC. SINGOSARI	KEC. LAWANG	KEC. PUJON	KEC. NGANTANG	KEC. KASEMBON	KEC. GEDANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drs. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH YUSUF	377.440	18.741	39.895	29.190	15.696	15.670	7.444	12.666	516.742
2	Drs. H. EGGI SUDJANA, SH., M.Si dan Drs. MOCH. SIHAD	24.227	892	2.257	1.495	966	966	451	823	32.077
3	Drs. BAMBANG DH. M.Pd dan MH. SAID ABDULLAH	87.359	3.017	6.481	5.244	3.334	2.974	1.940	2.608	112.957
4	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan H. HERMAN S. SUMAWIREDJA	274.102	11.962	23.124	12.035	11.320	6.906	4.023	7.158	350.630
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA	763.128	34.612	71.757	47.964	31.316	26.516	13.858	23.255	1.012.406

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MALANG

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

Page 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 5

Hasil Rekap Perhitungan Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013

LAMPIRAN
MODEL DB 1 KWK. KPU

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

A. SUARA SAH

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR
		Jumlah Pindahan	KEC. TIRTOYUDO	KEC. KROMENGAN	KEC. WONOSARI	KEC. PAGELARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drs. H. SOEKARWO dan Drs. H. SAIFULLAH YUSUF	516.742	15.793	9.055	9.387	12.585				563.562
2	Drs. H. EGGI SUDJANA, SH., M.Si dan Drs. MOCH. SIHAD	32.077	1.035	744	767	631				35.314
3	Drs. BAMBANG DH. M.Pd dan MH. SAID ABDULLAH	112.357	4.688	3.234	2.630	3.075				126.584
4	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA dan H. HERMAN S. SUMAWIREDJA	350.630	8.328	5.801	7.009	11.155				382.923
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA	1.012.406	29.844	18.834	19.793	27.506	0	0	0	1.108.383

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN MALANG

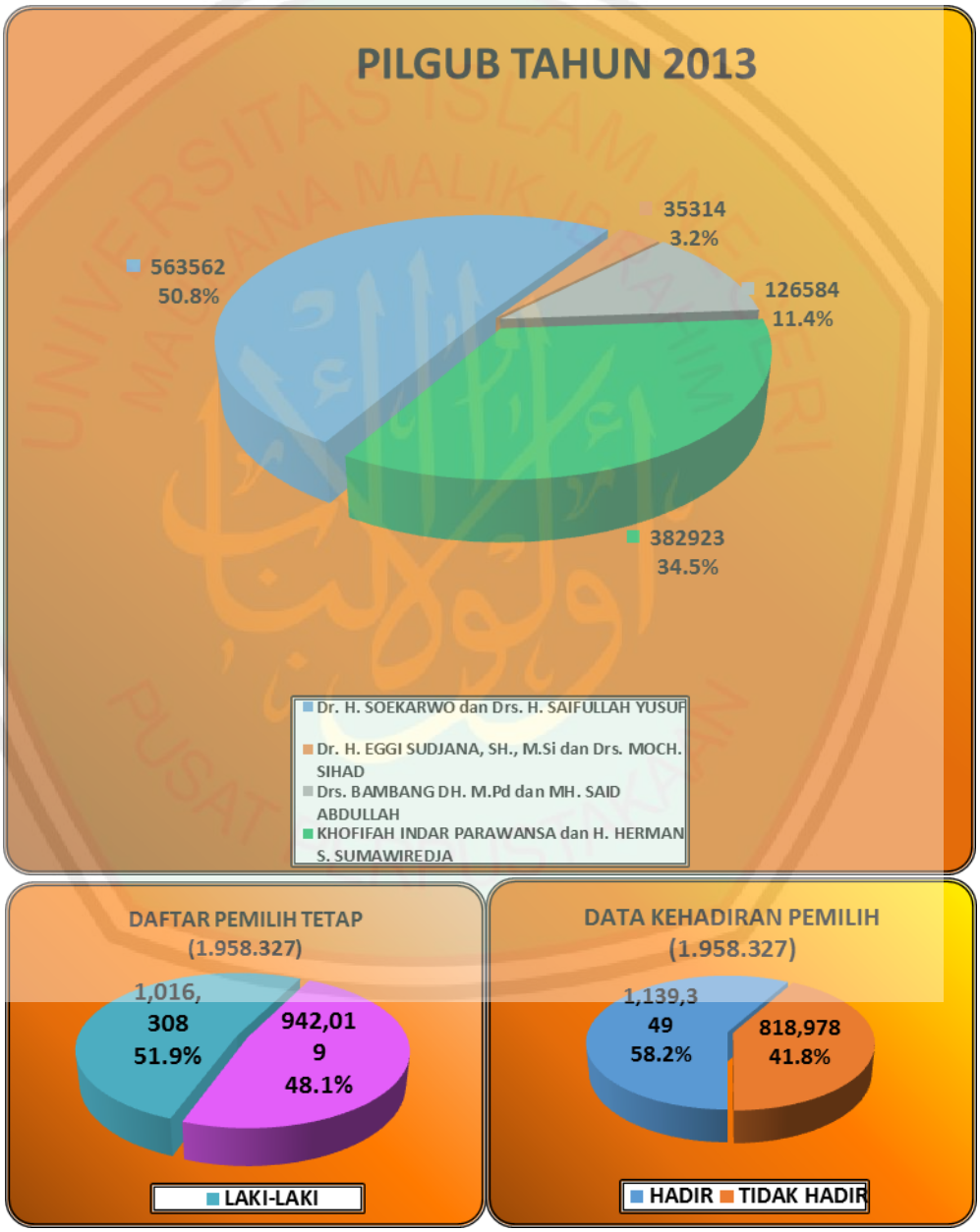
1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. .....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 6 Prosentase Hasil Rekap Perhitungan Pilgub Tahun 2013



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 6
Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Kabupaten Malang

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	TPS	DAFTAR PEMILIH		KEHADIRAN PEMILIH		PARMAS	PEROLEHAN SUARA		SUARA	SUARA
				LK	PR	LK	PR	(%)	PASLON 1	PASLON 2	SAH	TIDAK SAH
1	AMPELGADING	13	103	23.335	23.345	13.555	14.120	59%	12.367	14.790	27.157	518
2	BANTUR	10	130	29.224	30.346	15.486	16.720	54%	17.760	13.964	31.724	482
3	BULULAWANG	14	112	25.805	26.461	15.117	17.711	63%	14.670	17.021	31.691	1.137
4	DAMPIT	12	198	49.004	49.741	28.062	30.244	59%	28.189	28.921	57.110	1.196
5	DAU	10	105	24.585	24.555	16.539	17.779	70%	15.729	17.549	33.278	1.040
6	DONOMULYO	10	121	27.427	27.582	15.225	16.128	57%	14.111	16.684	30.795	558
7	GEDANGAN	8	120	22.224	22.403	12.770	12.802	57%	12.028	13.196	25.224	348
8	GONDANGLEGI	14	128	31.807	32.867	16.655	18.977	55%	18.478	16.257	34.735	897
9	JABUNG	15	146	27.939	27.613	18.071	20.110	69%	18.191	18.563	36.754	1.427
10	KALIPARE	9	116	27.505	28.015	14.933	16.427	56%	15.695	15.114	30.809	551
11	KARANGPLOSO	9	103	28.168	28.139	18.253	20.134	68%	17.047	20.306	37.353	1.034
12	KASEMBON	6	73	12.492	11.883	7.772	8.442	67%	7.888	7.942	15.830	384
13	KEPANJEN	18	169	39.843	41.513	23.088	26.649	61%	27.292	20.958	48.250	1.487
14	KROMENGAN	7	85	15.845	16.193	9.889	11.160	66%	8.425	12.204	20.629	420
15	LAWANG	12	164	38.493	39.626	24.781	28.212	68%	25.248	25.892	51.140	1.853
16	NGAJUM	9	96	20.062	19.867	12.414	13.699	65%	13.033	12.503	25.536	577
17	NGANTANG	13	103	22.811	22.355	14.484	15.860	67%	12.614	16.844	29.458	886
18	PAGAK	8	84	19.730	20.444	10.116	11.662	54%	10.579	10.794	21.373	405
19	PAGELARAN	10	97	26.720	27.297	14.991	16.719	59%	17.441	13.609	31.050	660
20	PAKIS	15	201	50.569	51.267	31.737	35.305	66%	30.864	34.105	64.969	2.073
21	PAKISAJI	12	117	32.244	32.377	20.474	23.375	68%	22.949	19.302	42.251	1.598
22	PONCOKUSUMO	17	156	37.505	36.913	22.535	24.685	63%	20.038	25.216	45.254	1.966
23	PUJON	10	107	25.846	24.558	18.245	18.959	74%	17.419	18.737	36.156	1.048
24	SINGOSARI	17	232	62.164	64.278	37.021	42.167	63%	39.357	36.841	76.198	2.990
25	SUMBERMANJING WETAN	15	165	37.913	38.301	21.940	22.817	59%	21.478	22.566	44.044	713
26	SUMBERPUCUNG	7	89	22.244	23.105	12.217	14.530	59%	12.717	13.329	26.046	701
27	TAJINAN	12	104	20.939	20.977	13.046	14.964	67%	12.888	14.300	27.188	822
28	TIRTOYUDO	13	115	25.546	25.300	16.709	16.744	66%	15.100	17.760	32.860	593
29	TUMPANG	15	127	30.158	29.697	18.862	20.425	66%	16.001	21.919	37.920	1.367
30	TUREN	17	149	45.497	45.701	25.858	29.276	60%	25.151	28.739	53.890	1.244
31	WAGIR	12	134	31.698	30.880	21.938	23.494	73%	22.846	21.175	44.021	1.411
32	WAJAK	13	151	33.320	33.584	18.626	20.981	59%	15.366	23.159	38.525	1.082
33	WONOSARI	8	78	17.833	17.791	10.359	11.310	61%	9.768	11.391	21.159	510
		390	**4.178**	**986.495**	**994.974**	**591.768**	**652.587**	**63%**	**588.727**	**621.650**	**1.210.377**	**33.978**

Sumber Data : Data Diolah

CENTRAL LIBRARY OF UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Tabel 7
Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Kabupaten Malang

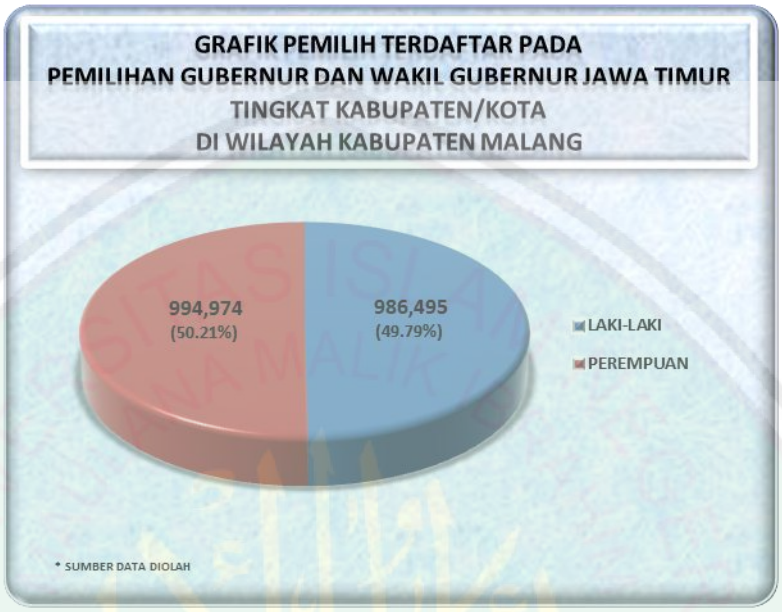
NO	KECAMATAN	DESA / KEL	TPS	DAFTAR PEMILIH		KEHADIRAN PEMILIH		PARMAS (%)
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	AMPELGADING	13	103	23.335	23.345	13.555	14.120	59%
2	BANTUR	10	130	29.224	30.346	15.486	16.720	54%
3	BULULAWANG	14	112	25.805	26.461	15.117	17.711	63%
4	DAMPIT	12	198	49.004	49.741	28.062	30.244	59%
5	DAU	10	105	24.585	24.555	16.539	17.779	70%
6	DONOMULYO	10	121	27.427	27.582	15.225	16.128	57%
7	GEDANGAN	8	120	22.224	22.403	12.770	12.802	57%
8	GONDANGLEGI	14	128	31.807	32.867	16.655	18.977	55%
9	JABUNG	15	146	27.939	27.613	18.071	20.110	69%
10	KALIPARE	9	116	27.505	28.015	14.933	16.427	56%
11	KARANGPLOSO	9	103	28.168	28.139	18.253	20.134	68%
12	KASEMBON	6	73	12.492	11.883	7.772	8.442	67%
13	KEPANJEN	18	169	39.843	41.513	23.088	26.649	61%
14	KROMENGAN	7	85	15.845	16.193	9.889	11.160	66%
15	LAWANG	12	164	38.493	39.626	24.781	28.212	68%
16	NGAJUM	9	96	20.062	19.867	12.414	13.699	65%
17	NGANTANG	13	103	22.811	22.355	14.484	15.860	67%
18	PAGAK	8	84	19.730	20.444	10.116	11.662	54%
19	PAGELARAN	10	97	26.720	27.297	14.991	16.719	59%
20	PAKIS	15	201	50.569	51.267	31.737	35.305	66%
21	PAKISAJI	12	117	32.244	32.377	20.474	23.375	68%
22	PONCOKUSUMO	17	156	37.505	36.913	22.535	24.685	63%
23	PUJON	10	107	25.846	24.558	18.245	18.959	74%
24	SINGOSARI	17	232	62.164	64.278	37.021	42.167	63%
25	SUMBERMANJING WETAN	15	165	37.913	38.301	21.940	22.817	59%
26	SUMBERPUCUNG	7	89	22.244	23.105	12.217	14.530	59%
27	TAJINAN	12	104	20.939	20.977	13.046	14.964	67%
28	TIRTOYUDO	13	115	25.546	25.300	16.709	16.744	66%
29	TUMPANG	15	127	30.158	29.697	18.862	20.425	66%
30	TUREN	17	149	45.497	45.701	25.858	29.276	60%
31	WAGIR	12	134	31.698	30.880	21.938	23.494	73%
32	WAJAK	13	151	33.320	33.584	18.626	20.981	59%
33	WONOSARI	8	78	17.833	17.791	10.359	11.310	61%
	JUMLAH	**390**	**4.178**	**986.495**	**994.974**	**591.768**	**652.587**	**63%**

Sumber data : data diolah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

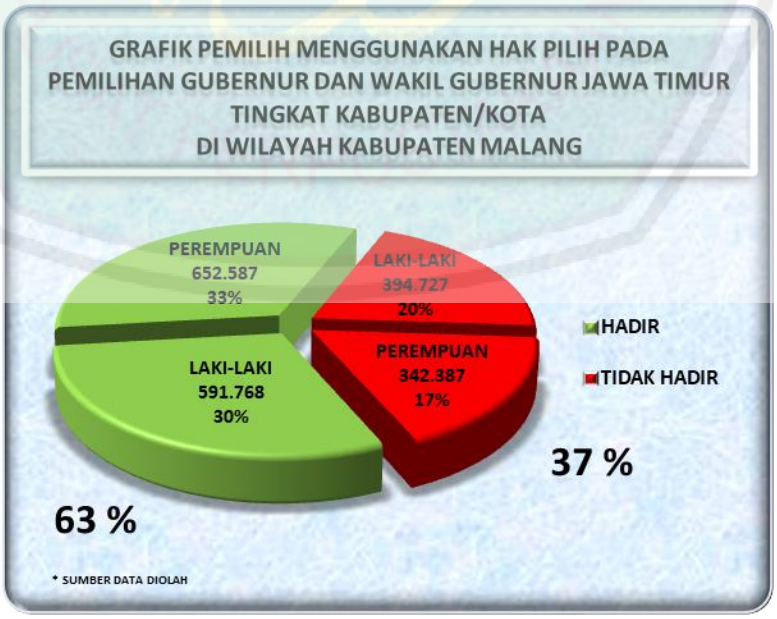
Gambar 7

Prosentase Pemilih Terdaftar Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Tingkat Kabupaten/ Kota Di Wilayah Kabupaten Malang



Gambar 8

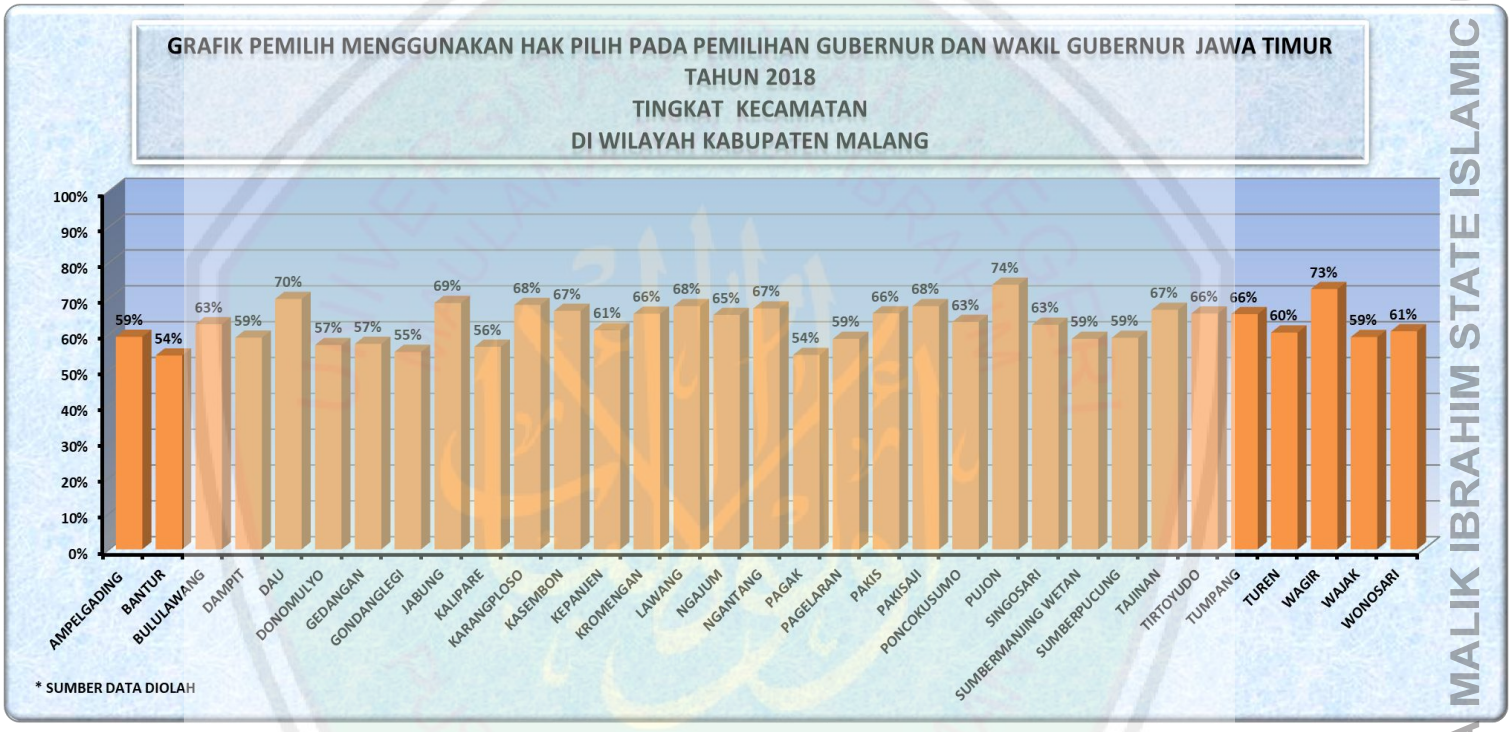
Prosentase Pemilih Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Tingkat Kabupaten/ Kota Di Wilayah Kabupaten Malang



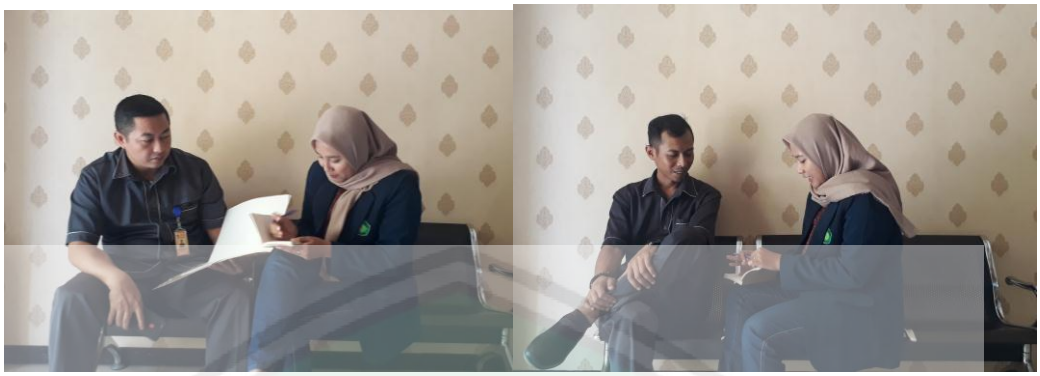
CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 9

Grafik Pemilih Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Tingkat Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Malang



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG







CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG









CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Neli Nurmala

NIM/Jurusan : 15230004/Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Irham Basori Hasba, M.H

Judul Skripsi : Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Menekan Angka Golput dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 22 Maret 2019	Perbaikan Judul dan Revisi BAB I, BAB II	
2.	Selasa, 8 April 2019	Revisi BAB I dan BAB II	
3.	Kamis, 11 April 2019	Revisi BAB II	
4.	Jum'at, 4 Oktober 2019	BAB III	
5.	Rabu, 6 November 2019	Revisi BAB III	
6.	Jum'at, 8 November 2019	BAB IV	
7.	Senin, 11 November 2019	Revisi BAB IV	
8.	Rabu, 20 November 2019	Revisi BAB IV, Abstrak	
9.	Rabu, 27 November 2019	Revisi Abstrak	
10.	Jum'at, 29 November 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 23 November 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH
NIP 196509192000031001

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Neli Nurmala
Tempat Tanggal Lahir	: Malang, 5 April 1997
Alamat	: Jl. Ketindan Lawang Malang
No.Hp	: 082230019487
Email	: Nurmalaneli@Gmail.Com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Islam NU Lawang = 2003 - 2009
2. MTS Al-Ma'arif 01 Singosari Malang = 2009 -2012
3. Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari = 2012 – 2015
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang = 2015 - 2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG